

**ANALISIS KUALITAS PENCATATAN AKUNTANSI AKRUAL PADA
PEMERINTAH DAERAH (PERBANDINGAN ANTARA KABUPATEN
PADANG PARIAMAN DAN KOTA SOLOK)**

TESIS

OLEH :

NUR RAHMANELY
2020532002



*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Akuntansi Pada Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Andalas*

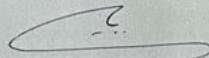
**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : Analisis Kualitas Pencatatan Akuntansi AkruaI Pada Pemerintah Daerah
(Perbandingan Antara Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Solok)
Nama : NUR RAHMANELY
Nomor BP : 2020532002
Program Studi : Magister Akuntansi

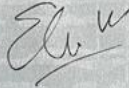
Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia ujian akhir Magister Akuntansi pada Program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada tanggal 24 Agustus 2022.

Menyetujui :
Komisi Pembimbing



Dr. Suhairi, SE, M.Si, Ak
NIP. 196012211987021002

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi



Dr. Elvira Luthan, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 196505071991032003

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Andalas

Dr. Efa Yonedi, S.E., MPPM, Ak.CA
NIP. 197205021996021001

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

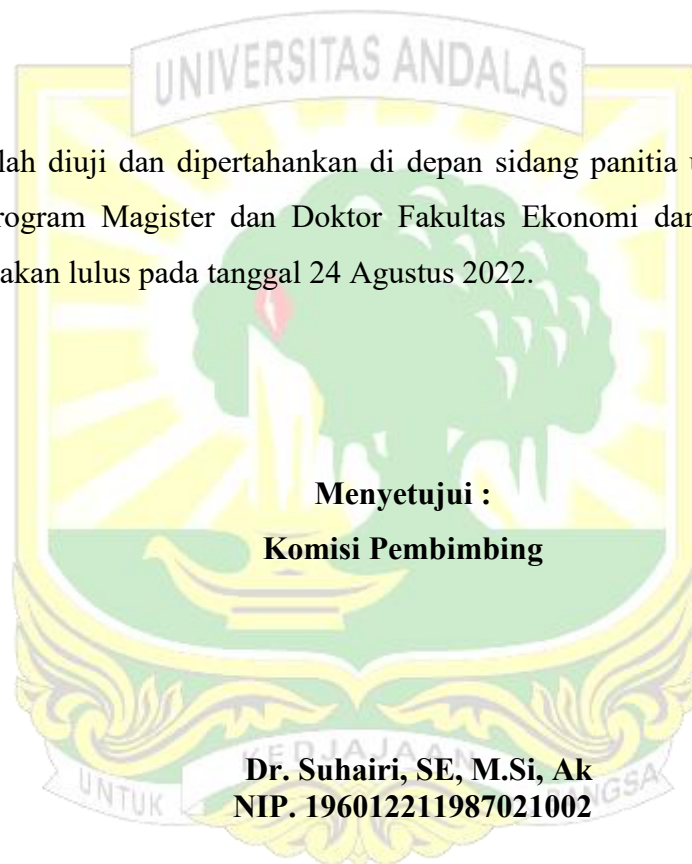
Judul Tesis : Analisis Kualitas Pencatatan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah Daerah
(Perbandingan Antara Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Solok)

Nama : NUR RAHMANELY

Nomor BP : 2020532002

Program Studi : Magister Akuntansi

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia ujian akhir Magister Akuntansi pada Program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada tanggal 24 Agustus 2022.



Menyetujui :

Komisi Pembimbing

Dr. Suhairi, SE, M.Si, Ak
NIP. 196012211987021002

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Andalas

Dr. Elvira Luthan, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 196505071991032003

Dr. Efa Yonedi, S.E., MPPM, Ak.CA
NIP. 19720502199602100

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna)
kepada siapa yang dikehendaki-Nya.
Barang siapa yang mendapat hikmah itu
Sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak,
Dan tiadalah yang menerima peringatan
melainkan orang-orang yang berakal"
(Q.S. Al-Baqarah: 269)

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat"
(Q.s. al-Mujadalah : 11)"

...kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan
menatap lebih lama, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, lapisan tekad yang seribu kali lebih
keras dari baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang akan selalu berdoa..."

Ungkapan hati sebagai rasa Terima Kasihku

Alhamdulillahirabbil 'alamin... Alhamdulillahirabbil 'alamin... Alhamdulillahirabbil 'alamin...

Akhirnya aku sampai ke titik ini,
sepercik keberhasilan yang Engkau hadiahkan padaku ya Rabb
Tak henti-hentinya aku mengucap syukur pada_Mu ya Rabb
Serta shalawat dan salam kepada idola ku Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia
Semoga sebuah karya mungil ini menjadi amal shaleh bagiku dan menjadi kebanggaan
bagi keluargaku tercinta
Ku persembahkan karya mungil ini...
untuk belahan jiwa ku yang tanpamu aku bukanlah siapa-siapa
di dunia fana ini Ibundaku tersayang (JASMAWATI, N)
serta orang yang menginjeksikan segala idealisme, prinsip, edukasi dan kasih sayang berlimpah
dengan wajah datar menyimpan kegelisahan ataukah perjuangan yang tidak pernah ku ketahui,
namun tenang temaram dengan penuh kesabaran
dan pengertian luar biasa, Ayahandaku tercinta (Drs. BUKAS)
Kepada Suamiku, Imamku tercinta (RIANO OSKAR, ST), yang dengan penuh cinta,
Telah menemaniku dalam setiap suka dan duka melalui setiap tahapan
Membuat hidup ini penuh warna dan menjadi berharga
Dengan kesabaran dan kasih sayang seluas samudra telah mengantarkanku sampai saat ini
Keempat Anakku (FATIH RAHMALIANO OSKAR, DZAKWAN FAKHRJANO OSKAR,
KEANU FIKRJANO OSKAR dan FAHIM ZIKRJANO OSKAR), sumber motivasi dan semangat
hidup, karena kalianlah kami bersemangat menjalani hidup dan kehidupan ini.

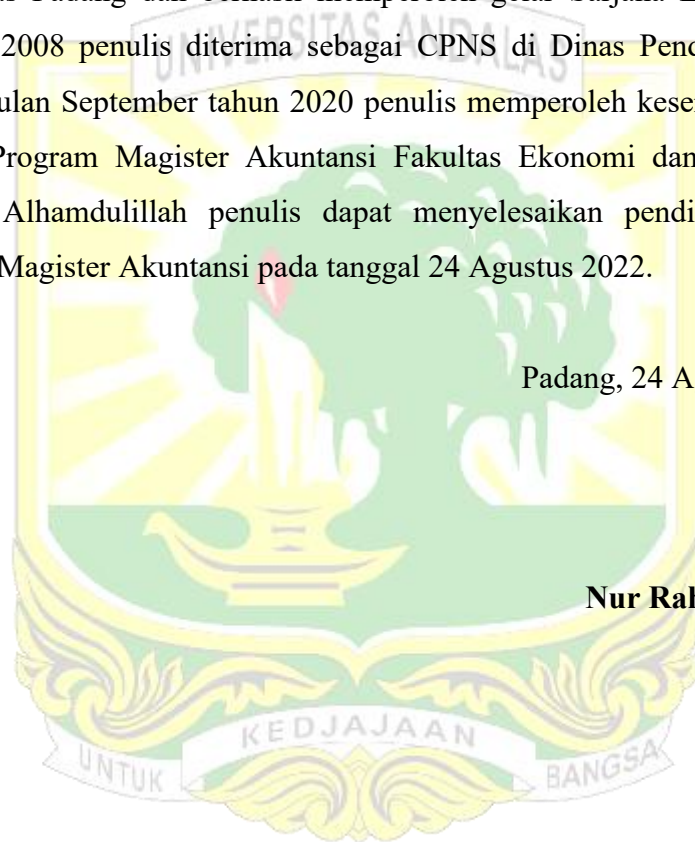
by: Nur Rahmanely

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir pada tanggal 19 Maret 1986 di Kota Padang Sumatera Barat, anak kedua dari empat bersaudara pasangan Drs. Bukas dan Jasmawati, N.BA Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD N 13 Simpang Haru Padang pada tahun 1997, kemudian mengikuti pendidikan lanjutan di SMP Negeri 8 Padang dan lulus pada tahun 2000, selanjutnya melanjutkan ke SMU Negeri 1 Padang dan berhasil lulus pada tahun 2003. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang dan berhasil memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 2007. Pada tahun 2008 penulis diterima sebagai CPNS di Dinas Pendidikan Kota Solok, selanjutnya pada bulan September tahun 2020 penulis memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan pada Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Padang. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyandang gelar Magister Akuntansi pada tanggal 24 Agustus 2022.

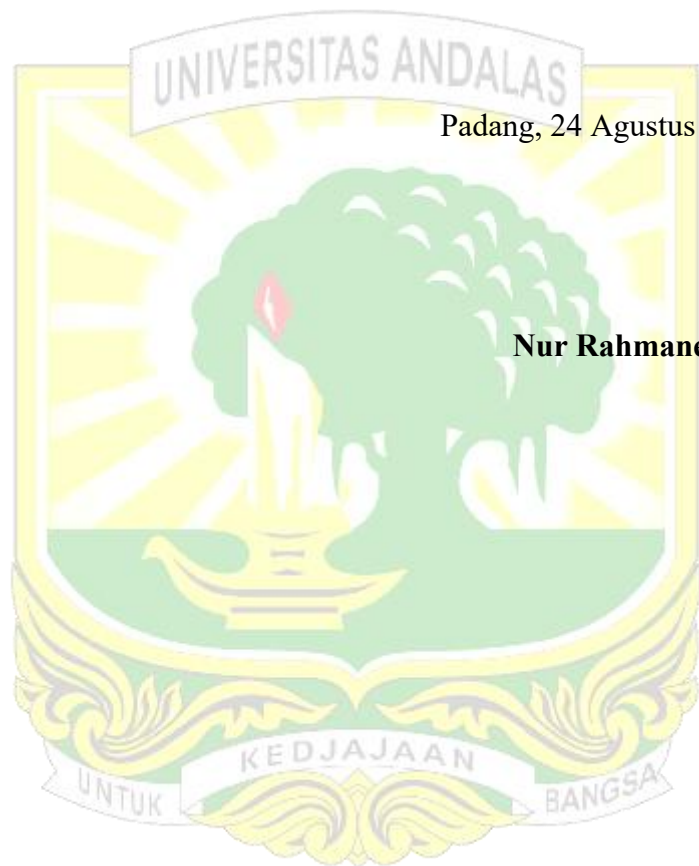
Padang, 24 Agustus 2022

Nur Rahmanely



PERNYATAAN

Dengan ini saya, Nur Rahmanely yang beralamat di Jalan Kartini No. 314 Kel. Kp. Jawa Kota Solok, menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dicantumkan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.



Padang, 24 Agustus 2022

Nur Rahmanely

**ANALISIS KUALITAS PENCATATAN AKUNTANSI AKRUAL PADA
PEMERINTAH DAERAH (PERBANDINGAN ANTARA KABUPATEN PADANG
PARIAMAN DAN KOTA SOLOK)**

**Oleh :
NUR RAHMANELY
2020532002**

**Dibimbing oleh
Dr. Suhairi, SE, M.Si, Ak**

ABSTRACT

The purposes of this study are to assess the quality of accrual-based accounting recording in OPD in Padang Pariaman Regency and Solok City Government and to see whether there is the difference in the quality of accrual accounting recording between the two regions. Assessment of the quality of the accrual-based accounting recording is based on the time of recognition of transactions. Accrual accounting quality is assessed through four types of accrual transactions, namely asset-to-expense conversion transactions, unpaid expense accrual transactions, unpaid asset accrual transactions, uncollected income transactions. The method used in this research is a quantitative approach in the form of comparison. The data used in this study is primary data in the form of questionnaires obtained directly from respondents. Respondents of this research are financial statement maker apparatus. The results showed that there differences in the quality of accrual-based accounting recording to OPD in Padang Pariaman Regency and Solok City.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kualitas pencatatan akuntansi berbasis akrual pada OPD di Kabupaten Padang Pariaman dan Pemerintah Kota Solok serta melihat apakah terdapat perbedaan kualitas pencatatan akuntansi akrual antara kedua daerah tersebut. Penilaian kualitas pencatatan akuntansi akrual didasarkan pada waktu pengakuan transaksi. Kualitas akuntansi akrual dinilai melalui empat jenis transaksi akrual, yaitu transaksi konversi aset menjadi beban, transaksi akrual beban yang belum dibayar, transaksi akrual aset yang belum dibayar, transaksi pendapatan yang belum tertagih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan bentuk perbandingan (komparatif). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang diperoleh langsung dari responden. Responden penelitian ini adalah aparatur pembuat laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan kualitas pencatatan akuntansi berbasis akrual pada OPD di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Solok.

KATA PENGANTAR

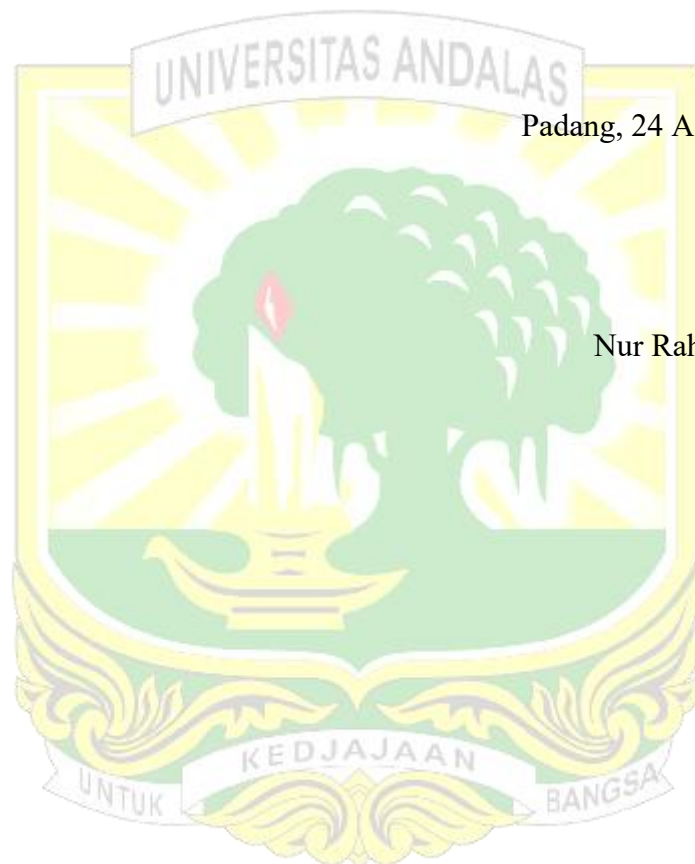
Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis telah dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: “Analisis Kualitas Pencatatan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah Daerah (Perbandingan Antara Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Solok)”. Shalawat dan Salam semoga selalu dilimpahkan kepada suri teladan junjungan umat yakni Nabi Besar Muhammad SAW.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Pemerintah Program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Padang. Banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini, baik moril maupun materil. Untuk itu pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua tercinta, Papa Drs. Bukas, Mama Jasmawati, N.BA, Ayah Mertua H. Joni Oskar (Alm), Ibu Mertua Hj. Sriyenti yang selalu mendoakan, mencurahkan kasih sayangnya dan mensupport penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.
2. Suami tercinta, Riano Oskar, ST yang memberikan dukungan dengan sepenuh hati dan penuh kesabaran serta keempat buah hatiku Fatih Rahmaliano Oskar, Dzakwan Fakhriano Oskar, Keanu Fikriano Oskar dan Fahim Zikriano Oskar, sebagai sumber inspirasi dan motivasi penulis, sehingga telah dapat menyelesaikan pendidikan ini.
3. Bapak Dr. Suhairi, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan arahan dan masukan yang sangat berharga demi kelancaran penyusunan tesis ini.
4. Ibu Dr. Elvira Luthan, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.
5. Ibu Dr. Erna Widiastuty, SE, M. Si selaku Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.
6. Seluruh staf pengajar Program Studi S2 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis di masa perkuliahan, serta kepada karyawan dan karyawan sekreatariat Program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.

7. Teman-teman satu angkatan Ike Roza Mardian, Aulia, Icha, Rengga, Wina, Monic, Putri, Deny, Karina, Mafaza, Putri dan Rusda semoga ikatan persahabatan kita akan selalu terjalin dengan baik.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu Penulis mengharapkan masukan berupa saran dan kritikan yang sifatnya membangun, sehingga penulisan berikutnya lebih sempurna. Harapan Penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan mendapat ridha Allah SWT. Amin ya rabbal 'alamin.



Padang, 24 Agustus 2022

Nur Rahmanely

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Sistematika Penulisan.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori.....	7
2.1.1. <i>Technology Acceptance Model (TAM)</i>	7
2.1.2. Akuntansi Berbasis Akrua.....	8
2.1.3. Akuntansi Berbasis Akrua di Dunia.....	9
2.1.4. Akuntansi Berbasis Akrua di Indonesia.....	10
2.1.5. Standar Akuntansi Pemerintahan.....	15
2.1.6. Kualitas Informasi Akuntansi Berbasis Akrua.....	16
2.2. Penelitian Terdahulu.....	18
2.3. Pengembangan Hipotesis.....	20
2.4. Kerangka Pemikiran.....	22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel.....	23
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	25
3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	25
3.4. Metode Analisis.....	28

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

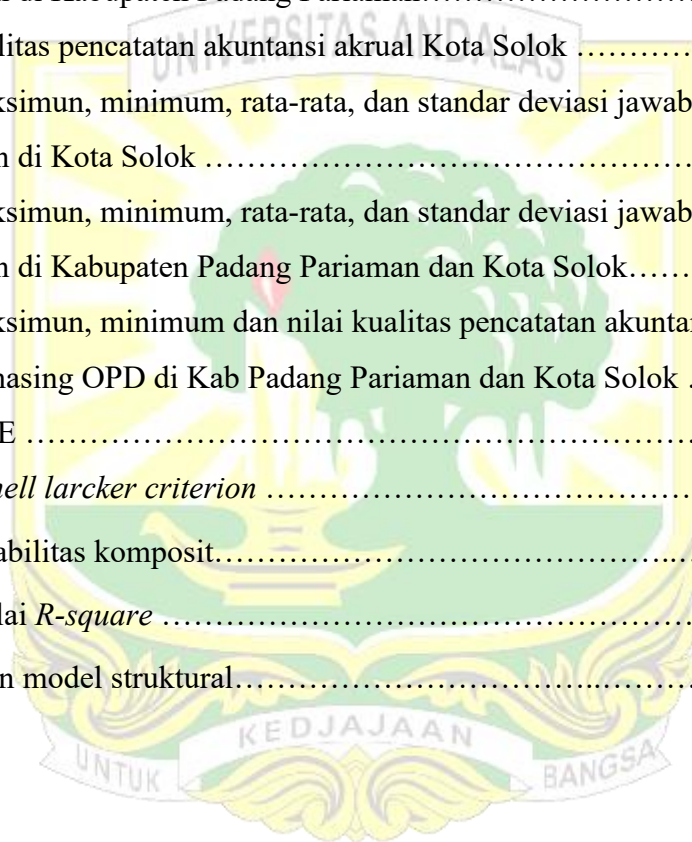
4.1. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.....	31
4.2. Gambaran Umum Pemerintah Kota Solok.....	31
4.3. Analisis Deskriptif.....	32
4.4. Analisis SEM.....	39

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	47
5.2. Saran.....	47

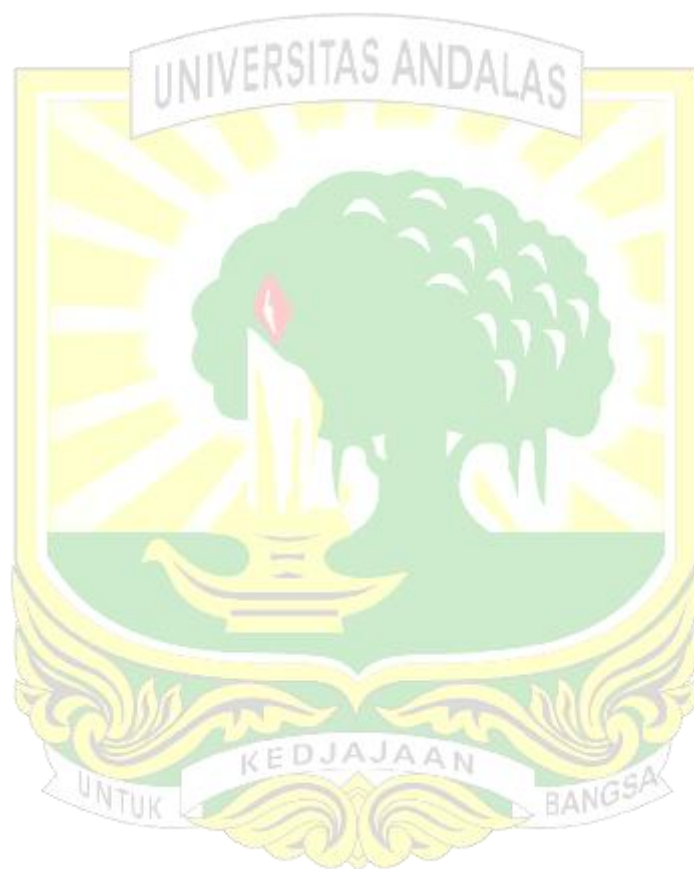
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan manfaat <i>cash basis</i> dan <i>acrual basis</i>	12
Tabel 2.2 Perbedaan pencacatan <i>cash basis</i> dan <i>acrual basis</i>	13
Tabel 2.3 Perbandingan pengakuan pendapatan dan beban pada <i>acrual</i> dan <i>cash basis</i>	14
Tabel 3.1 Nama-nama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Dan Kota Solok	23
Tabel 4.1 Nilai kualitas pencatatan akuntansi akrual Padang Pariaman	32
Tabel 4.2 Nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi jawaban responden di Kabupaten Padang Pariaman.....	34
Tabel 4.3 Nilai kualitas pencatatan akuntansi akrual Kota Solok	34
Tabel 4.4 Nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi jawaban responden di Kota Solok	36
Tabel 4.5 Nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi jawaban responden di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Solok.....	36
Tabel 4.6 Nilai maksimum, minimum dan nilai kualitas pencatatan akuntansi akrual pada masing-masing OPD di Kab Padang Pariaman dan Kota Solok	37
Tabel 4.7 Nilai AVE	42
Tabel 4.8 Nilai <i>fornell larcker criterion</i>	42
Tabel 4.9 Nilai reliabilitas komposit.....	43
Tabel 4.10 Hasil nilai <i>R-square</i>	44
Tabel 4.11 Pengujian model struktural.....	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Jalur	39
Gambar 2. Outer Model Step 1	40
Gambar 3 Outer Model Step 2	41



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangannya dengan mengeluarkan UU Nomor 32/2004 yang telah direvisi melalui UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33/2004 yang telah direvisi melalui UU Nomor 1/2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menjadi dasar pentingnya pengelolaan keuangan daerah dalam mengelola dana publik (Khasanah dan Pramudyastuti, 2020). Pengelolaan keuangan harus dilaksanakan dengan transparan dan bertanggung jawab, namun anggapan yang beredar dimasyarakat selama ini menganggap organisasi sektor publik kurang produktif, tidak efisien, kualitas rendah dan kurang inovasi (Mahmudi, 2010). Untuk mengatasi semua problem dan respon masyarakat terhadap kinerja pengelolaan pemerintah (sektor publik), maka pemerintah berusaha untuk melakukan reformasi di bidang sektor publik dengan menerapkan *New Public Manajemen* (NPM).

NPM bertujuan menghasilkan layanan yang efisien dan efektif, namun tidak berorientasi kepada laba (Osborne dan Gaebler, 1992), sedangkan menurut Sari dan Putra (2012) tujuan NPM untuk mengubah pengelolaan keuangan negara menjadi lebih informatif. Akuntansi berbasis akrual merupakan *international best practice* dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip NPM karena pengelolaan keuangan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas (Mu'am, 2015). Menurut Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Binsar Simanjuntak, tantangan terbesar yang dihadapi dari peralihan basis kas menuju basis akrual adalah komitmen yang kuat dari pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta kesiapan sumber daya manusia (Simanjuntak, 2010). Sumber daya manusia yang kurang kompeten serta sikap enggan untuk melakukan perubahan, menjadi tantangan bagi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, selain itu masih belum matangnya persiapan pemerintah, sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kurang intensif, kebijakan/sistem akuntansi yang belum terintegrasi serta belum tersedianya alokasi anggaran khusus untuk penyusunan dan pelaksanaan akuntansi akrual (BPK, 2015).

Menurut Harun dan Robinson (2010) salah satu hambatan yang signifikan dalam penerapan akuntansi akrual adalah kurangnya staf akuntansi yang berkualifikasi dalam sektor publik. Penerapan akuntansi akrual di pemerintahan terbatas pada hasil laporan akuntansi akrual saja, namun prosesnya tidak berbasis akrual dengan berbagai permasalahan teknis salah satunya kekurangan staf yang memenuhi syarat dan berkompoten (Yuliati *et al.*, 2019), walaupun banyak kendala yang dihadapi pada masa awal penerapan akrual, namun tidak menjadi penghalang bagi pemerintah untuk tetap menerapkan akuntansi akrual, sehingga pada tahun 2015 pemerintah telah mewajibkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan.

Perubahan sistem pertanggungjawaban keuangan pemerintah dimulai dengan terbitnya UU No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dimana setiap entitas pemerintahan wajib melaksanakan standar akuntansi yang berbasis akrual. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah (Trihani, 2018). Menurut Sari dan Putra (2012) akuntansi berbasis kas tidak dapat memberikan informasi yang memadai tentang hutang dan piutang dalam pengambilan keputusan ekonomi, sedangkan akuntansi berbasis akrual memberikan informasi yang dapat diandalkan, menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya serta memberikan informasi keuangan yang komprehensif tentang pemerintahan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual merupakan standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja serta pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran basis yang ditetapkan dalam APBD. Regulasi bagi pemerintah daerah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP berbasis akrual di pemerintah daerah.

Menurut Weygant (2013) akuntansi berbasis akrual merupakan pencatatan transaksi saat peristiwa terjadi dalam periode akuntansi yang dapat merubah posisi keuangan perusahaan. Penerapan akuntansi basis akrual dengan mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) sehingga, transaksi dan peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya (Wawointana *et al.*, 2021). Basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban

dan ekuitas dana sehingga basis akrual mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Mu'am, 2015).

Penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia berlaku untuk seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah merupakan upaya untuk mendapatkan legitimasi dari pemerintah pusat (Djambhuri, 2009). Menurut Kumaradewi (2018) akuntansi berbasis akrual lebih mudah dipahami oleh pelaku ekonomi sehingga lebih hemat biaya karena menyajikan informasi fiskal yang dibutuhkan, lebih sulit dimanipulasi, dapat mengidentifikasi tunggakan pembayaran serta menyajikan informasi likuiditas. Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual penting untuk memperhatikan pencatatan transaksi yang dilakukan, sehingga kualitas baik/buruknya penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah sangat bergantung pada kesesuaian antara terjadinya transaksi dan waktu pencatatannya (Wahyudi, 2019) dimana penilaian kualitas penerapan akuntansi akrual berdasarkan waktu pengakuan transaksi keuangan yaitu semakin akurat waktu pencatatan, semakin tinggi kualitas akrual (Ritonga, 2018). Pengakuan transaksi keuangan pada pemerintah daerah, diakui dan dicatat setelah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.

Sejak diberlakukan dan diwajibkan penerapan akuntansi berbasis akrual diseluruh instansi kementerian pusat dan pemerintah daerah, beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan kualitas akuntansi berbasis akrual yang telah diterapkan antara lain : Ismiyati (2016) meneliti pada lima pemda (Bantul, DIY, Karanganyar, Sleman dan Yogyakarta) menemukan bahwa kualitas penerapan akuntansi berbasis akrual bervariasi dan tidak sama disetiap daerah. Ritonga (2018) meneliti tentang kualitas penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah di Indonesia yang terdiri dari kabupaten/kota dan provinsi, menemukan hasil bahwa masih rendahnya kualitas penerapan akuntansi berbasis akrual di berbagai pemerintah daerah.

Herwiyanti *et al.* (2017) melakukan analisis implementasi akuntansi berbasis akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menemukan hasil bahwa kesiapan Inspektorat Jendral Kementerian Keuangan dalam implementasi sistem akuntansi akrual sudah baik, mulai dari aspek komunikasi, sumber daya, komitmen organisasi hingga struktur organisasi dengan penilaian kepuasan mencapai 93,40 persen. Wahyudi (2019) meneliti kualitas implementasi akuntansi berbasis akrual pada tiga satuan kerja kementerian negara/lembaga pemerintah pusat yaitu : Kantor pusat

Direktorat jendral perbendaharaan, Kantor pelayanan pajak pratama Sleman dan Sekretariat utama Badan Pusat Statistik menemukan hasil masih rendahnya kualitas penerapan akuntansi berbasis akrual pada instansi tersebut, dengan persentase tertinggi pada Kantor pusat Direktorat jendral perbendaharaan dan terendah pada Sekretariat utama Badan Pusat Statistik.

Purwanto (2015) meneliti tentang penerapan akuntansi berbasis akrual pada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) *pilot project* di Daerah Istimewa Yogyakarta, dari hasil penelitian diketahui bahwa strategi yang diambil dalam rangka implementasi akuntansi berbasis akrual adalah menyusun kebijakan akuntansi, menyiapkan sarana dan prasarana, mempersiapkan sumber daya manusia, membentuk tim uji coba, menyusun pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, membentuk tim pendamping dan mewajibkan semua SKPD menyusun lapopran keuangan tahunan 2014 berbasis akrual disamping laporan keuangan berbasis CTA.

Saat ini penerapan akuntansi akrual di Indonesia telah memasuki tahun keenam, meskipun sudah pelaksanaan tahun keenam namun masih banyak kendala dan kekurangan yang dirasakan antara lain: masih rendahnya kualitas implementasi (Ritonga, 2018), kurangnya pemahaman dan kompetensi sumber daya manusia karena tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi (Harun dan Robinson, 2010), serta besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menerapkan sistem yang baru (Wahyuni, 2016). Berdasarkan berbagai permasalahan di atas evaluasi pencatatan akuntansi akrual menjadi hal yang sangat penting dilakukan. Evaluasi diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penerapan pencatatan akuntansi akrual serta mencari solusi dan upaya penerapan akuntansi akrual yang sesuai dengan SAP (Ritonga, 2018), namun belum banyak penelitian dilakukan untuk mengukur kualitas pencatatan akuntansi akrual. Berbeda dengan penelitian Ritonga (2018) yang meneliti tentang kualitas penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian yang akan dilakukan ini mengambil objek Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Solok, hal ini untuk melihat apakah terdapat perbedaan kualitas pencatatan akuntansi akrual pada masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pemerintah daerah (antara pemerintah kota dan kabupaten), daerah yang dipilih pada tahun 2020 mendapatkan peringkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyajian laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan tingkat kualitas pencatatan akuntansi berbasis akrual antara OPD kedua daerah berdasarkan ketepatan waktu pengakuan transaksi dengan 4 dimensi

yang dikemukakan Ritonga (2018) yaitu transaksi konversi aset menjadi pengeluaran, transaksi biaya yang belum dibayarkan, transaksi akrual aktiva yang belum dibayar, transaksi penerimaan tidak tertagih.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kualitas pencatatan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Pemerintah Kota Solok ?
2. Apakah terdapat perbedaan kualitas pencatatan akuntansi berbasis akrual antara pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Pemerintah Kota Solok?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menilai bagaimana kualitas pencatatan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Pemerintah Kota Solok
2. Untuk melihat apakah terdapat perbedaan kualitas pencatatan akuntansi akrual antara Kabupaten Padang Pariaman dan Pemerintah Kota Solok.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai upaya dalam mewujudkan kualitas pencatatan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Pemerintah Kota Solok, peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat:

1. Memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Pemerintah Kota Solok, mengenai kualitas pencatatan akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan dan informasi terkait dengan kualitas pencatatan akuntansi berbasis akrual.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan para peneliti berikutnya sehubungan dengan kualitas pencatatan akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan daerah.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang dibagi dalam lima bab yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang menggambarkan garis besar dari pokok-pokok penulisan secara menyeluruh.

BAB II Tinjauan Pustaka

Menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran. Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai literatur didalam penelitian ini.

Bab III Metodologi Penelitian

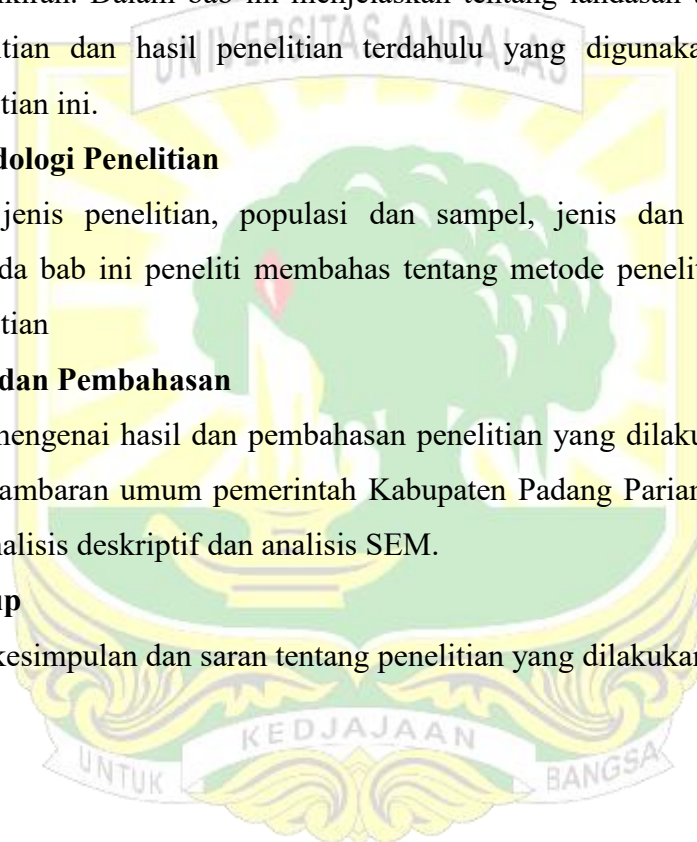
Menguraikan jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan. Pada bab ini peneliti membahas tentang metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini menjelaskan gambaran umum pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan pemerintah Kota Solok, analisis deskriptif dan analisis SEM.

Bab V Penutup

Menguraikan kesimpulan dan saran tentang penelitian yang dilakukan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu model penerimaan pengguna terhadap penggunaan sistem teknologi informasi (Venkatesh *et al.*, 2003). *Technology Acceptance Model (TAM)* dikembangkan oleh Davis (1989) diadopsi dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*, yaitu teori tindakan yang beralasan yang dikembangkan oleh Fishbein *et al.* (1975). TAM menjelaskan hubungan sebab akibat antara keyakinan (akan manfaat suatu teknologi/sistem informasi dan kemudahan penggunaannya) dan perilaku, serta tujuan/keperluan dan penggunaan aktual dari teknologi/sistem informasi tersebut (Davis, 1993). TAM terdiri dari penggunaan sistem (*system usage*), *perceived usefulness*, *perceived ease of use*, dan variabel eksternal. *System usage* merupakan indikator utama dari penerimaan teknologi dan diukur dengan frekuensi dan waktu (Davis, 1989). Untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer yang diperkenalkan pertama kali adalah Fred Davis pada tahun 1986. TAM memiliki tujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan penerimaan (*acceptance*) pengembangan pengguna terhadap suatu sistem informasi ada. TAM juga menerapkan suatu basis teoritis untuk memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan dalam pengembangan terhadap suatu teknologi dalam suatu individu atau kelompok.

Menurut Davis (1989) terdapat dua konstruk utama pada model TAM yaitu *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*. Kemudahan penggunaan yang dirasakan merujuk kepada sejauh mana individu menyakini bahwa memakai sistem tertentu akan bebas dari kesulitan atau usaha besar (Davis, 1989). TAM didefinisikan sebagai model utama yang penting bagi proses penggunaan komputerisasi tanpa terkecuali dalam hal pencatatan transaksi keuangan berbasis akrual. Dalam penerapan TAM jika dilakukan dengan secara baik maka dalam hal ini menimbulkan efektifitas yang meningkat serta efektivitas yang relevan bagi proses komputerisasi khususnya dalam pencatatan akuntansi berbasis akrual. Untuk itu pengimplementasi TAM jika tidak dilakukan dengan benar dan baik maka akan menimbulkan penurunan kualitas pencatatan akuntansi akrual dalam proses pembuatan laporan keuangan, namun sebaliknya apabila dilakukan dengan benar akan memberikan peningkatan kualitas pencatatan akuntansi akrual di pemerintah.

2. Akuntansi Berbasis Akrual

Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mencatat transaksi keuangan pada periode terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran uang tunai (Weygant, 2013). Menurut Lampiran I.02 PSAP 01 PP Nomor 71 Tahun 2010: “Basis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas/setara kas diterima/dibayar. Akuntansi berbasis akrual merupakan suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhitungkan waktu kas/setara kas diterima/dibayar (KSAP, 2006).

Menurut Bastian (2010) akrual merupakan basis pelaporan keuangan, dimana pengaruh transaksi dan peristiwa diakui pada saat terjadinya (bukan pada saat kas atau setara kas diterima), dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Akuntansi akrual memberikan informasi komprehensif, dimana seluruh sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal dan arus ekonomi lainnya. Pada akuntansi berbasis akrual entitas mengakui hutang dan piutang, baik karena perolehan aset, pendapatan dan beban. Aset diakui ketika manfaat ekonomi masa depan mengalir ke entitas dan pengukuran yang andal dimungkinkan. Pendapatan diakui pada saat kewajiban diselesaikan dalam periode akuntansi. Beban diakui ketika upaya dilakukan untuk menghasilkan pendapatan. Dari berbagai definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntansi berbasis akrual merupakan akuntansi yang mencatat dan mengakui transaksi keuangan pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan waktu penerimaan dan pembayaran kas terjadi.

Menurut Heather Thompson dalam (Widjarso, 2009) tujuan penggunaan basis akrual adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem keuangan sektor publik.
2. Meningkatkan manajemen asset, pengendalian fiskal dan budaya sektor publik.
3. Meningkatkan akuntabilitas program penyediaan barang dan jasa pemerintah.
4. Untuk menyediakan informasi kompleks bagi pemerintah dalam mengambil keputusan.
5. Untuk mereformasi sistem anggaran belanja.
6. Mencapai transparansi atas biaya pelayanan yang dilakukan pemerintah.

Akuntansi berbasis akrual memiliki manfaat yang besar dalam menyajikan informasi atas seluruh aktivitas yang terjadi. Menurut Widjajerso (2009) beberapa alasan penerapan akrual basis pada pemerintahan adalah :

1. Basis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, seperti informasi hutang dan piutang untuk pengambilan keputusan ekonomi.
2. Basis akrual menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya.
3. Basis akrual menghasilkan informasi yang handal tentang aset dan kewajiban.
4. Basis akrual menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif.

Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat (Sari dan Putra, 2012). Kelebihan penerapan akuntansi basis akrual menurut *International Federation of Accountants* (IFAC), 2003) adalah memberikan gambaran bagaimana pemerintah membiayai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan pendanaannya, memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini, menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya, menyediakan ruang bagi pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya, dan memberikan manfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifitas.

3. Akuntansi Berbasis Akrual di Dunia

Pada awalnya pencatatan keuangan didunia menggunakan kas basis. Akuntansi berbasis kas diterapkan karena lebih mudah dan praktis. Pada pencatatan berbasis kas, transaksi/aktivitas ekonomi di akui ketika terjadi aliran kas masuk dan keluar dan kinerja keuangan pemerintah diukur berdasarkan perbedaan penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode, laporan keuangan yang dihasilkan dari berbasis kas hanya fokus kepada transaksi ekonomi yang mempunyai arus kas (Wahyudi, 2019).

Akuntansi akrual telah menjadi topik utama dalam reformasi akuntansi sektor publik selama beberapa dekade terakhir. Berbagai negara telah mencoba untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan keuangannya, meskipun dengan berbagai macam modelnya dan implementasi yang berbeda-beda di berbagai negara artinya ada negara yang menerapkan akrual secara penuh baik laporan keuangan dan anggaran, namun ada juga negara yang masih menggunakan basis kas dalam penganggaran dan basis akrual untuk laporan keuangannya (Sari dan Putra, 2012). Keputusan yang diambil oleh suatu negara untuk mengadopsi dan mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual tidak

menghilangkan perdebatan tentang ketepatan penggunaan akuntansi berbasis akrual pada organisasi sektor publik (Carlin, 2005). Negara yang sukses menerapkan akrual adalah New Zealand, Australia dan Swedia. Keberhasilan New Zealand dalam menerapkan akuntansi basis akrual merupakan peran aktif dari Treasury dan badan akuntansi professional yang memberikan dukungan berupa pelatihan, pelayanan konsultasi kepada entitas pemerintah, sedangkan Australia dianggap berhasil menerapkan akuntansi berbasis akrual karena keterlibatan dari berbagai tingkat pemerintahan dalam mensosialisasikan visi akrual, serta pelaksanaan tahapan reformasi menuju akuntansi akrual yang berhasil dicanangkan (Sari dan Putra, 2012).

Menurut Ryan (1998) Australia mengadopsi sistem akuntansi akrual di Australia bertujuan untuk meningkatkan pencatatan dan pengukuran terkait pengeluaran pemerintah, sedangkan motif ekonomi menjadi alasan dibalik pengadopsian sistem akuntansi berbasis akrual pada organisasi sektor publik di Selandia Baru (Lye *et al.*, 2005). Menurut Herwiyanti *et al.* (2017) setidaknya ada dua motivasi yang mendasari pengadopsian sistem akuntansi akrual, yaitu motif ekonomi yang didorong oleh aktor didalam organisasi dan motif kekuasaan yang didorong oleh aktor diluar organisasi, dimana perbedaan motif tersebut memberikan hasil yang berbeda dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, sedangkan menurut Lye *et al.* (2005) perubahan akuntansi merupakan sarana untuk mencapai tujuan, dimana akuntansi berbasis akrual diperkenalkan untuk mencapai kontrol dan mengukur kinerja entitas pemerintah untuk memberikan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan.

4. Akuntansi Berbasis Akrual di Indonesia

Penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia bermula dengan diterbitkannya UU No 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara dan UU No 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara yang mengamanatkan agar pemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual selambat-lambatnya pada tahun 2008 (Wahyudi, 2019). Tahun 2005 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi akuntansi berbasis akrual, PP tersebut memuat basis akuntansi yang digunakan selama masa transisi sebelum penerapan akrual penuh yaitu *cash toward accrual* (CTA), namun hingga tahun 2008 pemerintah pusat maupun daerah belum dapat menerapkan akuntansi berbasis akrual, hal itu disebabkan belum adanya peraturan maupun UU yang mengatur standar akuntansi berbasis akrual (Ritonga, 2015).

Pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan ditetapkan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005, menurut peraturan ini implementasi akuntansi berbasis akrual harus dilaksanakan paling lambat 4 tahun setelah tahun 2010 yaitu tahun 2015, dimana pada tahun 2015 seluruh pemerintah baik pusat maupun daerah beserta lembaga wajib menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan negara (Wahyudi, 2019). Penerapan basis akrual di Indonesia merupakan amanat UU yang mengatur tentang keuangan negara, basis akrual akan diterapkan di seluruh entitas pelaporan dan entitas akuntansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penerapan ini dilaksanakan secara bertahap dan pada tahun 2015 semua pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah telah “hijrah” ke basis akrual (Mu’am, 2015). Penerapan akuntansi akrual di pemerintah daerah Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (GAS) pada tanggal 22 Oktober Tahun 2010 (Ritonga, 2018).

Dengan ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum dan artinya pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual, perubahan basis akuntansi dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh mengandung konsekwensi yang tidak sedikit (Hariyanto, 2014). Penerapan akuntansi berbasis akrual dicanangkan untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ketentuan mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual secara bertahap untuk pemerintah pusat diatur oleh peraturan menteri keuangan dan untuk pemerintah daerah diatur oleh peraturan menteri dalam negeri (Zelmiyanti, 2015). Menurut Prabowo *et al.* (2017) Penerapan akuntansi akrual di Indonesia bertujuan untuk mencegah praktek korupsi dengan menetapkan peraturan yang rinci, kaku dan tidak fleksibel.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) akuntansi akrual merupakan suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya, diakui, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan, sedangkan menurut Zelmiyanti (2015) akuntansi akrual merupakan suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadi transaksi tersebut tanpa memperhatikan kapan pendapatan atau beban tersebut diterima atau dibayarkan, selain itu akuntansi basis akrual juga melakukan pencatatan terhadap aset dan kewajiban. Implementasi SAP basis akrual berpengaruh pada perubahan pelaksanaan dan

sistem akuntansi dan harus didukung kapasitas dan kemampuan SDM. Hal ini disebabkan penerapan SAP basis akrual lebih sulit dibandingkan penerapan akuntansi basis kas (Zelmiyanti, 2015). Dalam masa awal penerapannya akuntansi berbasis akrual tidaklah berjalan mulus, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapannya antara lain : belum ada aturan baku mengenai tahapan penerapan mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015, kurangnya kompetensi SDM, minimnya jumlah petugas pendamping serta sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang belum sempurna (Purwanto, 2015). Menurut Hoesada (2010) akuntansi berbasis akrual memberi informasi lebih lengkap dan baik. Akuntansi berbasis akrual menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya, akurat, komprehensif dan relevan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Informasi keuangan yang akurat dan lengkap dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Menurut Kara dan Kilic (2011) terdapat banyak manfaat apabila menggunakan akuntansi berbasis akrual. Laporan keuangan menjadi lebih berkualitas (lebih jelas, sebanding dan akurat).

Perbedaan laporan keuangan basis CTA dan basis akrual :

1. Laporan Keuangan Berbasis CTA terdiri dari : Neraca Komparatif, LRA, LAK, CaLK
2. Laporan Keuangan Berbasis Akrual terdiri dari : Neraca Komparatif, LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, LPE, LAK, CaLK

Tabel 2.1
Perbandingan Manfaat Basis Kas dan Basis Akrual

Kriteria	Basis Kas	Basis Akrual
Pemahaman	Sederhana namun tidak lazim bagi kebanyakan orang	Kompleks namun lazim bagi kebanyakan orang
Manipulasi	Relatif mudah dimanipulasi	Mudah dimanipulasi, tergantung pada standar akuntansi dan standar audit
Memberikan informasi yang menyeluruh	Hanya informasi terkait kas	Informasi terkait dengan kas dan tambahan
Bermanfaat dalam pengelolaan arus kas	Hanya menyediakan informasi dasar	Memberikan informasi tentang kas dan komitmennya
Pengelolaan aset non-keuangan	Tidak menyediakan informasi non-keuangan	Memberikan informasi mengenai aset
Dapat diperbandingkan	memiliki format yang berbeda-beda di setiap negara sehingga tidak konsisten	Standar akuntansi yang digunakan berbeda-beda antar negara sehingga tidak konsisten dengan negara lain
Mengukur keberlanjutan kebijakan fiskal	Sangat terbatas	Bermanfaat, namun harus ditambahkan dengan informasi lain

Kriteria	Basis Kas	Basis Akrua
Kredibilitas	Terbatas	Lebih dikenal untuk menilai instansi dan kreditur
Dasar bagi penentuan strategi fiskal	Terbatas	Bagus, jika digunakan dengan informasi mengenai kas
Akuntabilitas	Terbatas	Memberikan informasi tersebut
Dasar penentuan harga	Terbatas	Bagus
Menghalangi tindakan kecurangan dan korupsi	Terbatas	Lebih bagus daripada basis kas, tergantung pada lingkungan pengendalian dan aspek lainnya
Implementasi	Biaya sistem informasi tinggi	Biaya lebih rendah, namun diperlukan biaya ekstra untuk identifikasi dan penilaian aset dan komponen lain
Keberlanjutan operasi	Skill yang diperlukan rendah, dengan karyawan yang banyak	Mudah untuk dipertahankan dan mengajari operator

Sumber: Athukorala & Reid dalam (Sousa et.al, 2012).

Tabel 2.2
Perbedaan pencatatan *cash basis* dan *accrual basis*

No	Transaksi	Basis Kas	Jurnal Penyesuaian	Basis Akrua
1	Transaksi konversi aset menjadi beban	Belanja ATK xxx Perubahan SAL xxx	Beban ATK xxx Persediaan xxx	Persediaan ATK xxx RK PPKD xxx (Kas di Ben Pengeluaran)
2	Transaksi akrual beban yang belum dibayar		Hutang Listrik/Air/Telepon xxx RK PPKD (Kas di Bend Pengeluaran) xxx	Beban Listrik/Air xxx Hutang Listrik/Air xxx
3	Transaksi akrual aset yang belum dibayar		Hutang Belanja RK PPKD (Kas di Bend Pengeluaran) xxx	Persediaan xxx Hutang Belanja xxx
4	Transaksi pendapatan yang belum ditagih		Piutang Pendapatan Retribusi xxx Pendapatan Retribusi xxx	

Menurut Yusuf dan Nurhayati (2017) Perbedaan konsep *Cash Basis* dan *Accrual Basis* adalah :

Tabel 2.3
Perbandingan Pengakuan Pendapatan dan Biaya pada *Cash Basis* dan *Akrual Basis*

	<i>Cash Basis</i>	<i>Accrual Basis</i>
Pengakuan Pendapatan	Saat pengakuan pendapatan adalah pada saat perusahaan menerima pembayaran secara kas	Saat pengakuan pendapatan adalah pada saat perusahaan mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan perusahaan.
Pengakuan Biaya	Pengakuan biaya dilakukan pada saat sudah dilakukan pembayaran secara kas	Pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi

Beberapa keunggulan *Cash Basis* adalah:

- ✓ digunakan dalam pengakuan belanja, pendapatan, pembiayaan.
- ✓ beban belum diakui sampai pembayaran secara kas, meskipun beban telah terjadi.
- ✓ pendapatan diakui saat diterimanya kas, sehingga mencerminkan posisi yang sebenarnya.
- ✓ penerimaan kas biasanya diakui sebagai pendapatan.
- ✓ laporan Keuangan memperlihatkan posisi keuangan yang ada pada saat laporan tersebut.

Kelemahan *Cash Basis* adalah:

- ✓ tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia.
- ✓ digunakan oleh perusahaan kecil
- ✓ manajemen sulit menentukan kebijakan kedepan

Keunggulan *Accrual Basis* adalah:

- digunakan dalam pengukuran kewajiban, aset dan ekuitas dana.
- beban diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi lebih handal dan terpercaya.
- pendapatan diakui saat terjadi transaksi
- banyak digunakan oleh perusahaan besar
- piutang tidak tertagih tidak akan dihapus langsung tetapi dihitung kedalam estimasi piutang tak tertagih.
- setiap penerimaan dan pembayaran dicatat kedalam akun sesuai dengan transaksi yang terjadi.
- peningkatan pendapatan perusahaan karena pendapatan dapat diakui meskipun belum menerima kas.
- laporan keuangan dijadikan pedoman manajemen dalam menentukan kebijakan perusahaan kedepannya.

Kelemahan pencatatan akuntansi secara *accrual basis* adalah :

- biaya yang belum dibayarkan secara kas, dicatat sebagai biaya sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan.
- resiko pendapatan tak tertagih sehingga dapat membuat mengurangi pendapatan perusahaan.
- pembentukan cadangan akan dapat mengurangi pendapatan perusahaan.

5. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan salah satu ujung tombak pengelolaan keuangan daerah yang baik, akuntabel, dan transparan (Wahyuni, 2016). Menurut Budiono (2016), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia, sedangkan menurut Sinaga (2005) SAP merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. SAP merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan pusat, SAP memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan Indonesia (Suwanda, 2015).

Penerapan SAP berbasis akrual di sektor publik memiliki keuntungan meningkatkan akuntabilitas, manajemen aset serta efisiensi namun selain keuntungan, penerapan SAP berbasis akrual juga memiliki kelemahan yaitu biaya/cost yang lebih tinggi serta meningkatnya kompleksitas laporan keuangan yang dihasilkan (Wynne, 2008). Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah, laporan yang dibuat harus memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku umum (Nugraha, 2009). Laporan keuangan pemerintah merupakan hasil dari proses akuntansi yang berpedoman kepada standar akuntansi pemerintah, yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholders* sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparansi (Herwiyanti *et al.*, 2017).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa “Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah”, yang dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Kerangka Konseptual

Akuntansi Pemerintahan berisi konsep-konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). PSAP kemudian menetapkan pedoman untuk memperlakukan suatu objek yang harus dilaporkan mulai dari pengakuan, pengukuran/penilaian, sampai dengan penyajian dan pelaporan objek tersebut (Herwiyanti *et al.*, 2017).

6. Kualitas Informasi Akuntansi Berbasis Akruwal

Kualitas dalam KBBI berarti tingkat baik buruknya sesuatu. Pencatatan transaksi dilakukan saat terjadi sehingga kualitas/baik buruknya penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah sangat bergantung pada kesesuaian antara terjadinya transaksi dan waktu pencatatannya (Wahyudi, 2019). Menurut Munawir (2002) Laporan keuangan merupakan hasil proses akuntansi yang memberikan informasi mengenai keadaan perusahaan dan sebagai alat komunikasi antara data keuangan dengan pihak yang berkepentingan dengan data perusahaan, sedangkan menurut Suwanda (2015) laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang menghubungkan antara perusahaan dengan stakeholders yang memberikan informasi bermanfaat bagi pihak-pihak untuk mengetahui keadaan dan perkembangan perusahaan yang bersangkutan dan Laporan keuangan yang diterbitkan harus buat berdasarkan standar akuntansi yang berlaku sehingga laporan keuangan bisa dibandingkan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Informasi akuntansi yang berkualitas harus relevan, andal, sebanding, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk memberikan informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan (Retnowati dan Ridwan, 2020). Informasi yang relevan merupakan informasi yang memiliki nilai umpan balik, nilai prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Informasi yang dapat dipercaya merupakan informasi yang bebas dari hal yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara wajar, dan dapat diverifikasi (Ritonga, 2018).

Menurut Jati (2019) Kualitas laporan keuangan merupakan karakteristik kualitatif yang membuat informasi pada laporan keuangan bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi penggunanya. Karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan ukuran atau standar normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi

sehingga dapat dapat memenuhi tujuannya (Suwanda, 2015). Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71/2010), kualitas laporan keuangan pemerintah adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Empat karakteristik normatif yang harus dipenuhi agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat memenuhi kualitas yang diinginkan adalah (Suwanda, 2015):

a. Relevan.

Laporan keuangan dinyatakan relevan apabila informasi yang terkandung di dalamnya mampu mempengaruhi keputusan pemakai dan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu/masa kini dan memprediksi masa depan.

b. Keandalan

Informasi laporan keuangan bebas dari hal yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur, dan dapat diverifikasi. Karakteristik informasi yang andal adalah : Penyajian yang jujur, dapat diverifikasi, netralitas

c. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi tren posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga dapat membandingkan laporan keuangan untuk mengevaluasi posisi keuangan suatu entitas, kinerja dan perubahan posisi keuangan secara relatif.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan pemahaman pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang cukup tentang aktivitas dan lingkungan operasi entitas pelapor, serta kemauan pengguna untuk mempelajari informasi dimaksud.

Dalam penelitian ini, penilaian kualitas pencatatan akuntansi akrual berdasarkan waktu pengakuan transaksi keuangan. Dimana semakin tepat/akurat waktu pencatatan transaksi maka akan semakin tinggi kualitas akrualnya.

Jenis transaksi akrual.

Ada lima jenis transaksi akrual (Ritonga, 2018). Kelima jenis tersebut adalah :

Tipe A: Transaksi konversi aset menjadi biaya.

Contoh untuk jenis ini adalah transaksi beban persediaan (konsumsi persediaan), transaksi beban penyusutan aset tetap (konsumsi aset tetap), transaksi beban amortisasi (konsumsi aset tidak berwujud), dan konversi beban dibayar di muka menjadi beban.

Tipe B: Mencatat transaksi pengeluaran yang belum dibayar.

Contoh untuk jenis ini adalah transaksi beban gaji dan tunjangan yang belum dibayar, transaksi beban biaya kerja lembur yang tidak dibayar, transaksi beban utilitas yang belum dibayar dan transaksi biaya jasa kebersihan/keamanan/catering.

Tipe C: AkruaI transaksi aset yang belum dibayar.

Contoh untuk jenis ini adalah transaksi akuisisi yang belum dibayar atas persediaan, transaksi akuisisi aset tetap yang belum dibayar dan transaksi akuisisi aset tidak berwujud yang belum dibayar

Tipe D: Transaksi pendapatan yang belum tertagih.

Contoh untuk jenis ini adalah transaksi penerimaan pajak tidak tertagih, transaksi penerimaan pungutan tidak tertagih, transaksi penerimaan deviden tidak tertagih atas investasi, dan transaksi penerimaan bunga/denda/penerimaan tagihan tidak tertagih.

Tipe E: Mengubah kewajiban menjadi pendapatan.

Contoh untuk jenis ini adalah konversi pendapatan prabayar menjadi pendapatan. Jenis-jenis tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kuesioner dalam penelitian ini.

B. Penelitian Terdahulu

Ritonga (2018) melakukan penelitian untuk menganalisis kualitas penerapan akuntansi akrual pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap 116 pemerintah daerah di Indonesia yang terdiri dari : 55 pemerintah daerah kabupaten, 36 pemerintah daerah kota, 2 pemerintah daerah provinsi, dari penelitian ini diketahui bahwa : pertama masih rendahnya kualitas penerapan akuntansi akrual pada pemerintah daerah di Indonesia yaitu sebesar 48,57% artinya sebagian besar transaksi akrual tidak diakui tepat waktu. Kedua, tidak ada perbedaan signifikan antara kualitas penerapan akuntansi akrual pemerintah daerah dengan opini wajar tanpa pengecualian dan pemerintah daerah dengan opini wajar dengan pengecualian artinya BPK RI mungkin belum mempertimbangkan kualitas akuntansi akrual dalam merumuskan opini. Ketiga, tidak adanya perbedaan kualitas akuntansi akrual antara pemerintah daerah kabupaten, kota, dan pemerintah daerah provinsi, artinya kompleksitas organisasi ukuran anggaran dan transaksi tidak mempengaruhi kualitas akuntansi akrual.

Ismiyati (2016) melakukan penelitian untuk mengevaluasi implementasi akuntansi berbasis akrual pada lima pemda (Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY dan Kabupaten Karanganyar). Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa hasil evaluasi implementasi akuntansi berbasis akrual pada lima pemda menunjukkan tingkat

akurasi yang berbeda-beda. Kabupaten Karanganyar menduduki posisi tertinggi dengan tingkat akurasi 70 persen, kemudian Kabupaten Sleman dengan akurasi 54 persen, Kabupaten Bantul dengan akurasi 52 persen, Provinsi DIY dengan tingkat akurasi 49,09 persen dan di posisi terakhir ditempati oleh Kota Yogyakarta dengan tingkat akurasi terendah yaitu sebesar 38 persen. Herwiyanti *et al.* (2017) melakukan penelitian untuk menganalisis implementasi akuntansi berbasis akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara umum kesiapan Inspektorat Jendral Kementerian Keuangan dalam implementasi sistem akuntansi akrual sudah baik, mulai dari aspek komunikasi, sumber daya, komitmen organisasi hingga struktur organisasi dengan penilaian kepuasan mencapai 93,40 persen.

Purwanto (2015) meneliti tentang penerapan akuntansi berbasis akrual pada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) *pilot project* di Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian ini meliputi strategi dan proses penerapan, prosedur pencatatan, penyusunan laporan keuangan berdasarkan PP 71 Tahun 2010. Hasil penelitian ini diketahui bahwa strategi yang diambil dalam rangka implementasi akuntansi berbasis akrual adalah menyusun kebijakan akuntansi, menyiapkan sarana dan prasarana, mempersiapkan sumber daya manusia, membentuk tim uji coba, menyusun pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, membentuk tim pendamping dan mewajibkan semua SKPD menyusun lapopran keuangan tahunan 2014 berbasis akrual disamping laporan keuangan berbasis CTA dan analisis kesesuaian antara pelaksanaan akuntansi akrual dengan PP 71 Tahun 2010 menunjukkan sebagian besar telah menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Satrio *et al.* (2016) melakukan penelitian tentang implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kabupaten Jombang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi dengan pimpinan dan pegawai dari bagian keuangan SKPKD dan SKPD. Hasil penelitian membuktikan bahwa Seluruh perangkat SKPD memiliki komitmen dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Perangkat regulasi dan kebijakan telah dibuat dan disosialisasikan serta diimplementasikan, untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan bagi pengelola keuangan SKPD. Ritonga (2015) melakukan penelitian dari bulan januari sampai maret 2015 dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini melakukan observasi dan pemberian konsultasi langsung dan tidak langsung kepada 71 unit kerja pada provinsi XYZ, hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua instansi tidak menerapkan akuntansi berbasis akrual yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual selama januari sampai maret 2015.

Wawointana *et al.* (2021) melakukan penelitian tentang evaluasi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengakuan pendapatan dan beban di BKAD Kota Manado telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dimana pendapatan di BKAD Kota Manado diakui berdasarkan tanggal penetapan pada dokumen dan beban diakui sesuai tanggal serah terima, pendapatan telah dilaporkan pada laporan realisasi anggaran dan laporan operasional, sedangkan beban dilaporkan pada laporan operasional. Sudaryati dan Permana (2020) melakukan penelitian untuk menganalisis penerapan SAP berbasis akrual pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi dokumenter dengan atasan dan pegawai bagian keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur mulai menerapkan standar akuntansi berbasis akrual untuk tahun fiskal 2015, laporan keuangan disajikan dengan basis akrual mulai tahun 2005 dan mendapat penilaian wajar dan sesuai dengan PP 71 tahun 2010, sedangkan kendala yang dihadapi pada awal masa perubahan kebijakan akuntansi berbasis akrual adalah kurangnya sosialisasi dari BPKAD dan kurangnya jumlah SDM.

Wahyudi (2019) melakukan penelitian untuk menganalisis kualitas implementasi akuntansi berbasis akrual. Penelitian dilakukan di Kantor pusat Direktorat jendral perbendaharaan, Kantor pelayanan pajak pratama Sleman dan Sekretariat utama Badan Pusat Statistik. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa : kualitas implementasi akrual pada ketiga satuan kerja tersebut masih rendah, kualitas implementasi tertinggi oleh Kantor pusat Direktorat Jendral Perbendaharaan senilai 56 persen, Kantor pelayanan pajak pratama Sleman 48,89, sedangkan Sekretariat utama Badan Pusat Statistik sebesar 40 persen.

C. Pengembangan Hipotesis

Kualitas pencatatan akuntansi berbasis akrual sangat penting dalam mendukung kesuksesan pencatatan akuntansi berbasis akrual yang telah diwajibkan kepada seluruh instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Penilaian kualitas penerapan akuntansi akrual didasarkan pada waktu pengakuan transaksi keuangan, dimana semakin akurat waktu pencatatan maka semakin tinggi kualitas akrual (Ritonga, 2018). Berbagai penelitian mengenai kualitas pencatatan akuntansi berbasis akrual telah dilakukan diberbagai instansi. Penelitian yang dilakukan Ismiyati (2016) evaluasi implementasi akuntansi berbasis akrual pada lima pemda (Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota

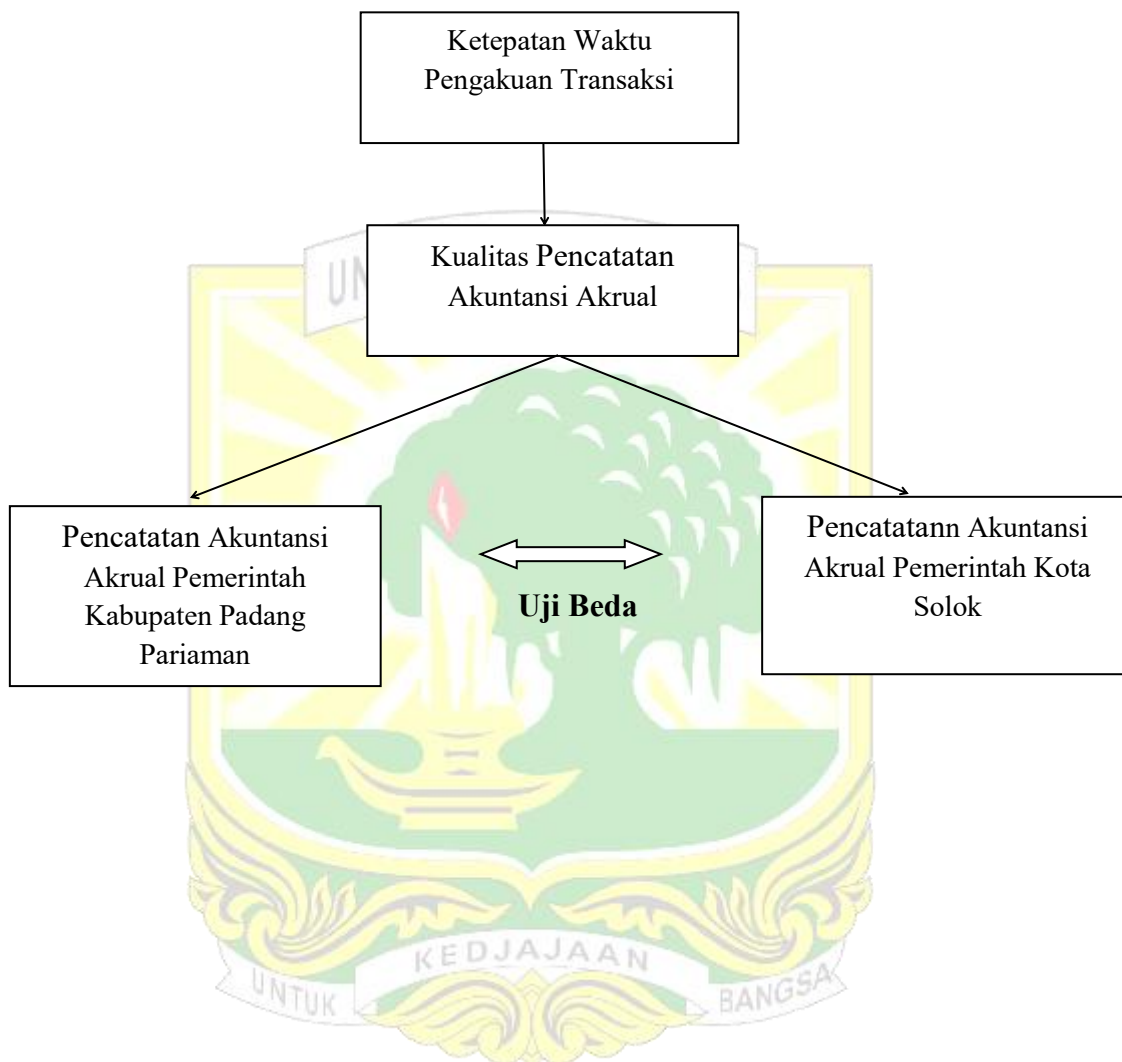
Yogyakarta, Provinsi DIY dan Kabupaten Karanganyar) menunjukkan tingkat akurasi yang berbeda-beda. Sejalan dengan penelitian Ismiyati (2016), Ritonga (2018) menemukan hasil masih rendahnya kualitas penerapan akuntansi akrual pada pemerintah daerah di Indonesia sebesar 48,57% dimana sebagian besar transaksi akrual tidak diakui tepat waktu, serta hasil penelitian Wahyudi (2019) menunjukkan bahwa kualitas implementasi akrual pada Kantor Pusat Direktorat jendral perbendaharaan, Kantor pelayanan pajak pratama Sleman dan Sekretariat utama Badan Pusat Statistik masih rendah, salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya pemahaman dan kompetensi sumber daya manusia karena tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi (Harun dan Robinson, 2010).

Penelitian ini berbeda dari penelitian Ritonga (2018) yang meneliti tentang kualitas penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian yang akan dilakukan ini mengambil objek Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Solok, hal ini untuk melihat apakah terdapat perbedaan kualitas pencatatan akuntansi akrual pada masing-masing pemerintah daerah (perbedaan antara pemerintah kota dan kabupaten), daerah yang dipilih pada tahun 2020 mendapatkan peringkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyajian laporan keuangan serta berdasarkan penelitian Herman (2016) menunjukkan bahwa perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam memahami akuntansi berbasis akrual dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk merevisi kebijakannya, dan hasil penelitian Octesa (2016) menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman dan penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah Kota Solok, hal ini sejalan dengan hasil penelitian Prasetya dan Indrayeni (2021) menunjukkan bahwa pentingnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki latar belakang akuntansi dalam mendukung pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi berbasis akrual di pemerintahan Kota Solok. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin melihat apakah terdapat perbedaan kualitas pencatatan akuntansi akrual di kedua daerah karena adanya perbedaan sumber daya manusia (tenaga akuntansi) yang membuat laporan keuangan, yang pada akhirnya akan berdampak kepada kualitas pencatatan akuntansi akrual di kedua daerah, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H 1 : Terdapat perbedaan kualitas pencatatan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Pemerintah Kota Solok.

D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, maka kerangka berpikir yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan bentuk perbandingan (komparatif). Penelitian komparatif merupakan penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau sampel yang berbeda, atau waktu yang berbeda (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini dilakukan analisis dan perbedaan kualitas pencatatan akuntansi berbasis akrual pada OPD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Pemerintah Kota Solok, dimana penulis mengukur kualitas pencatatan akuntansi berbasis akrual berdasarkan ketepatan waktu pengakuan transaksi.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek/obyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi yang bekerja pada 26 OPD dengan urusan yang sama dilingkup pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Pemerintah Kota Solok. Populasi dari penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 3.1
Nama-nama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Solok

No	OPD Kota Solok	OPD Kabupaten Padang Pariaman
1.	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
2.	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
3.	Satuan Polisi Pamong Praja	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
4.	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
5.	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
6.	Dinas Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
7.	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
8.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
9.	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
10.	Dinas Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	OPD Kota Solok	OPD Kabupaten Padang Pariaman
11.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
12.	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
13.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
15.	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Dinas Perikanan
16.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
17.	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
18.	Dinas Pangan	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
19.	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan
20.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika
21.	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
22.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
23.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25.	Badan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Daerah
26.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sampel adalah sebagian anggota populasi terpilih yang dijadikan objek penelitian (Sekaran dan Bougie, 2016). *Purposive sampling* digunakan penelitian ini. Menurut Sekaran dan Bougie (2016) pengambilan sampel dalam *purposive sampling* terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik karena mereka adalah satu-satunya pihak yang memilikinya, atau memenuhi kriteria yang ditetapkan peneliti. Dari setiap OPD akan diambil 2 responden dengan kriteria : pihak yang menerima delegasi wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pembuatan laporan keuangan OPD (eselon IV dan staf pembuat laporan keuangan) yaitu 26 Instansi dari pemerintah Kota Solok dan 26 Instansi dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 104.

B. Jenis dan Sumber Data

Data primer digunakan dalam penelitian ini. Data primer merupakan data yang langsung dari responden dalam menjawab pertanyaan penelitian. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari tempat aktual terjadinya peristiwa tersebut, bisa dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan, dan penyebaran kuesioner (Sekaran dan Bougie, 2016). Data dikumpulkan dengan cara penyebaran kuesioner diberikan melalui *Google Form* kepada para responden yang menjadi objek penelitian ini. Kuesioner mencakup perlakuan akuntansi akrual tentang waktu pengakuan dan pencatatan konversi aset menjadi beban, akrual beban yang belum dibayar, akrual aset yang belum dibayar, akrual pendapatan yang tidak tertagih. Adapun rancangan pertanyaan dalam kuisisioner terlampir.

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Kualitas Akrual

Menurut García-Teruel *et al.* (2009) kualitas akrual merupakan kualitas informasi akuntansi yang disajikan perusahaan yang membandingkan antara akrual dengan arus kas perusahaan pada periode masa lalu, sekarang dan masa depan. Informasi akuntansi yang berkualitas harus relevan, andal, sebanding, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Informasi yang relevan merupakan informasi yang memiliki nilai umpan balik, nilai prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Informasi yang dapat dipercaya merupakan informasi yang bebas dari hal yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara wajar, dan dapat diverifikasi (Ritonga, 2018). Pencatatan transaksi dilakukan saat terjadi sehingga kualitas/baik buruknya penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah sangat bergantung pada kesesuaian antara terjadinya transaksi dan waktu pencatatannya (Wahyudi, 2019). Kualitas pencatatan akuntansi berbasis akrual dalam penelitian ini berdasarkan ketepatan waktu pengakuan transaksi dengan menggunakan 4 dimensi pengukuran yang dikemukakan (Ritonga, 2018) yaitu transaksi konversi aset menjadi pengeluaran, transaksi biaya yang belum dibayarkan, transaksi akrual aktiva yang belum dibayar, transaksi penerimaan tidak tertagih.

2. Pengukuran Variabel

Pengukuran variable penelitian dilakukan dengan mengadopsi kuisisioner yang dikembangkan oleh (Ritonga (2018)) sebagai berikut :

A. Untuk dimensi transaksi konversi asset menjadi pengeluaran digunakan 4 pertanyaan yaitu :

1. Apakah ada transaksi pengeluaran persediaan (konsumsi persediaan) di pemerintah daerah Anda?
2. Apakah ada biaya penyusutan atas transaksi aset tetap (konsumsi aset tetap) di pemerintah daerah Anda?
3. Apakah ada transaksi biaya amortisasi (pemakaian aset tidak berwujud) di pemerintah daerah Anda?
4. Apakah ada transaksi biaya dibayar dimuka (seperti biaya asuransi dibayar dimuka, biaya prabayar bahan bakar, biaya prabayar listrik) di pemerintah daerah Anda?

B. Untuk dimensi transaksi biaya yang belum dibayar digunakan 8 pertanyaan yaitu :

- 1a. Apakah ada transaksi pengeluaran Gaji dan Tunjangan yang belum dibayar (misalnya ada pegawai yang sudah mendapat SK kenaikan pangkat atau jabatan, tetapi masih belum dibayar) di pemerintah daerah Anda?
- 1b. Jika jawaban 1a adalah Ya, apakah pengakuan beban gaji dan tunjangan juga diikuti dengan pengakuan utang pengeluaran gaji dan tunjangan?
- 2a. Apakah ada transaksi biaya kerja lembur yang tidak dibayar (misalnya, ada pegawai yang sudah bekerja lembur, tetapi masih belum dibayar) di pemerintah daerah Anda?
- 2b. Jika jawaban 2a adalah Ya, apakah pengakuan biaya kerja lembur juga diikuti dengan pengakuan hutang biaya kerja lembur?
- 3a. Apakah ada transaksi biaya utilitas yang belum dibayar (seperti listrik/air/telepon/internet) yang telah dikonsumsi, tetapi masih belum dibayar di pemerintah daerah Anda?
- 3b. Jika jawaban 3a adalah Ya, apakah pengakuan pengeluaran utilitas (listrik/air/telepon/internet) juga diikuti dengan pengakuan hutang pengeluaran utilitas (listrik/air/telepon/internet)?
- 4a. Apakah ada transaksi biaya jasa kebersihan/keamanan/katering yang telah dikonsumsi, tetapi masih belum dibayarkan di pemerintah daerah Anda?
- 4b. Jika jawaban 4a adalah Ya, apakah pengakuan biaya jasa kebersihan/keamanan/katering juga diikuti dengan pengakuan pengeluaran jasa kebersihan/keamanan/katering terutang?

C. Untuk dimensi transaksi akrual aktiva yang belum dibayar digunakan 3 pertanyaan yaitu :

1. Apakah ada transaksi akuisisi persediaan yang belum dibayar di pemerintah daerah Anda?
2. Apakah ada transaksi akuisisi aset tetap yang belum dibayar di pemerintah daerah Anda?
3. Apakah ada transaksi akuisisi aset tidak berwujud yang belum dibayar di pemerintah daerah Anda?

D. Untuk dimensi transaksi penerimaan tidak tertagih digunakan 4 pertanyaan yaitu :

1. Apakah ada transaksi penerimaan pajak yang tidak tertagih (yang telah menjadi hak pemerintah daerah) di pemerintah daerah Anda?
2. Apakah ada transaksi pendapatan yang belum tertagih (yang telah berhak atas pemerintah daerah) di pemerintah daerah Anda?
3. Apakah ada transaksi pendapatan dividen yang tidak tertagih atas investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah (dengan asumsi metode biaya) di pemerintah daerah Anda?
4. Apakah ada transaksi pendapatan bunga / pendapatan denda / pendapatan klaim yang tidak tertagih, di pemerintah daerah Anda?

Penilaian atas pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan nilai setiap jawaban dalam kuesioner dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika jawabannya "Ya" dan ada empat kemungkinan jawaban (yaitu, a, b, c, dan d), maka jawaban "a" diberi nilai 1, jawaban "b" diberi nilai 0,75, jawaban "c" diberi nilai 0,5 dan jawaban "d" diberi nilai 0,25.
 - b. Jika jawabannya "Ya" dan ada 5 pilihan jawaban (yaitu a, b, c, d, dan e), maka jawaban "a" diberi nilai 1, jawaban "b" diberi nilai 0,8, jawaban "c" diberi nilai 0,6, jawaban "d" diberi nilai 0,4; dan jawaban "e" diberi nilai 0,2.
 - c. Jika jawabannya "Tidak", maka tidak dinilai.
 - d. Jika pada nomor tersebut terdapat dua pertanyaan, yaitu pertanyaan a dan pertanyaan b (misal, pertanyaan 6a dan 6b), maka pertanyaan b dimaksudkan untuk menegaskan jawaban pada pertanyaan a. Jika jawaban pertanyaan a dan pertanyaan b berbeda, responden dianggap tidak konsisten dan tidak dinilai.
2. Menghitung nilai total setiap jenis transaksi akrual dengan menjumlahkan nilai semua pertanyaan pada jenis transaksi akrual.

3. Tetapkan nilai maksimum untuk setiap jenis transaksi akrual, bagaimana jumlah pertanyaan yang dijawab "Ya" untuk setiap jenis.

Contoh:

a. Pada transaksi akrual Tipe A terdapat 4 pertanyaan. Jika semua pertanyaan dijawab "Ya", maka nilai maksimalnya adalah 4. Jika ada satu pertanyaan dijawab "Tidak", maka nilai maksimalnya adalah 3 (4-1).

b. Pada transaksi akrual tipe B, terdapat 4 nomor pertanyaan (satu nomor, ada dua pertanyaan yaitu pertanyaan a dan pertanyaan b). Jika semua nomor dijawab "Ya" dan konsisten antara jawaban a dan b, maka nilai maksimumnya adalah 4. Jika ada satu pertanyaan yang dijawab "Ya" dan tidak konsisten antara jawaban a dan b, maka nilai maksimumnya adalah 3 (4 -1).

4. Menghitung nilai setiap jenis transaksi akrual dengan membagi nilai pencapaian (poin 2) dengan nilai maksimum (poin 3).

Menghitung nilai total pencapaian dengan membagi total nilai pencapaian dengan total nilai maksimum semua jenis transaksi. Pengukuran kualitas pencatatan akuntansi akrual berdasarkan waktu pengakuan transaksi keuangan, yaitu pada saat terjadinya transaksi, akhir bulan, akhir triwulan (31 Maret; 30 Juni; 30 September; 31 Desember), akhir semester (30 Juni; 31 Desember), atau akhir tahun (31 Desember). Semakin akurat waktu pengenalan, semakin tinggi kualitas akrual.

D. Metode Analisis

1. Statistik deskriptif sederhana

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan prosedur analisis data. Analisis statistik deskriptif merupakan tahap pertama untuk mendapatkan gambaran mengenai data yang diperoleh. Menghitung nilai tingkat pencapaian tertinggi dan terendah pada jenis transaksi akrual dengan kualitas implementasi terbaik dan terburuk dan juga menghitung nilai kualitas total untuk menganalisis kualitas akuntansi akrual pelaksanaannya di pemerintahan daerah secara keseluruhan.

2. Analisis SEM PLS

a. Analisis data dilakukan menggunakan SEM (*Structural Equation Modelling*) dengan menggunakan alat analisis *Partial Least Square* (PLS). Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reabilitas dalam *outer model*, serta uji *R-square*, *goodness of fit* dan *path coefficients* dalam *inner model* dan *bootstrapping*.

1) Analisis Model Pengukuran (Outer Model)

Penelitian ini menggunakan pendekatan SEM. Alat analisis yang digunakan dalam menganalisis permodelan SEM dan pengujian hipotesis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan software SmartPLS versi 3. Analisa *outer model* menguji indikator-indikator terhadap variabel laten yang berhubungan dengan variabel latennya. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas variabel dalam penelitian ini didasarkan pada hasil uji outer model yang meliputi *convergent validity*, *discriminant validity*, *composite reliability* dan *collinearity*.

➤ **Convergent Validity**

Convergent validity merupakan salah satu kriteria dalam pengujian analisa menggunakan Smart PLS. *Convergent validity* pada tingkat indikator disebut reliabilitas indikator atau loading. Pemeriksaan awal matriks *loading factor* dimana $\leq 0,3$ dipertimbangkan sudah memenuhi level minimal, *loading factor* $\leq 0,4$ dianggap lebih baik, *loading factor* $> 0,5$ dianggap signifikan. Penelitian ini menggunakan *loading factor* sebesar 0,5. Selanjutnya nilai *convergent validity* dapat dilihat dari nilai AVE. Nilai AVE harus lebih dari 0,5.

➤ **Discriminant Validity**

Nilai *discriminant validity* pada tahapan ini berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai. Penilaian yang diajukan dengan dua cara yaitu dengan melihat nilai *cross loading* dan *fornell-larcker criterion*. Selanjutnya untuk pengukuran *discriminant validity* ialah melihat nilai *fornell-larcker criterion*. Nilai *fornell-larcker criterion* setiap variabel laten harus lebih besar dari korelasi antar variabel yang lain (Chin, 1998).

➤ **Composite Reliability**

Composite reliability merupakan tahapan yang digunakan untuk menguji reliabilitas indikator-indikator suatu variabel. Suatu indikator dapat memenuhi syarat reliabel apabila memiliki nilai *composite reliability* > 0.6 . Uji reliabilitas dengan metode *composite reliability* juga dapat diperkuat dengan menggunakan nilai *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0.7 .

2) Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Tahapan selanjutnya setelah pengujian outer model terpenuhi, dilakukan pengujian inner model (*model structural*). Inner model dapat dievaluasi dengan melihat *r-square* (reliabilitas indikator) untuk konstruk dependen. (Hair et al. 2014) mengemukakan bahwa Nilai t statistik dapat dihitung dengan cara melakukan *resampling* dengan *bootstrapping*. Analisis Variasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengujian Hipotesis dilakukan berdasarkan hasil pengujian Inner Model (model struktural) yang meliputi koefisien parameter dan t-statistik. Untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak adalah dengan melihat nilai signifikansi antar konstruk, t-statistik, dan *p-values*. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari hasil bootstrapping. *Rules of thumb* yang digunakan pada penelitian ini adalah hipotesis yang mempunyai koefisien beta bernilai positif dengan tingkat signifikansi *p-value* 0,05 (5%).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Kabupaten Padang Pariaman secara geografis memiliki luas 1.328,79 Km² dengan panjang garis pantai 42,1 Km. Luas daratan ini 3,15 persen luas daratan wilayah Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Padang Pariaman secara astronomis terletak antara 0° 19' 15,68" – 0° 48' 59,868" Lintang Selatan dan antara 99° 57' 43, 325" – 100° 27' 28,94" Bujur Timur. Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 kecamatan dan 103 nagari dengan luas wilayah 1.343,09 Km². Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam tercatat memiliki wilayah paling luas, yakni 228,70 km², sedangkan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang memiliki luas wilayah terkecil, yakni 25,56 km².

Padang Pariaman menurut narasi tambo Minangkabau merupakan daerah rantau, daerah ini disebut sebagai daerah Rantau Pariaman, Daerahnya meliputi dataran rendah sempit (coastal lowland) disebelah barat dataran tinggi Minangkabau. Padang Pariaman membentang antara Batang Anai di selatan (batas dengan Kota Padang) dan Tiku disebelah Utara Kota Pariaman (Batas dengan Rantau Pasaman) dan kepedalaman sampai ketepi barat danau maninjau. Daerah rantau Pariaman kemudian dikenal luas sebagai wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 5.954 orang. Total penduduk Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2021 berjumlah 433.018 jiwa dengan kepadatan penduduk 322 setiap km².

B. Gambaran Umum Pemerintah Kota Solok

Kota Solok secara geografis terletak pada 0°44'28" – 0°49'12" LS dan 100°32'42" – 100°41'12" BT dengan luas 57,64 km² (5.764 ha) atau hanya 0,14% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Kota Solok terbentuk pada tanggal 16 Desember 1970, dengan luas wilayah 57,64 km² atau 0,14 % dari luas keseluruhan Provinsi Sumatera Barat. Bila dibandingkan dengan 7 (tujuh) kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Barat, luas Kota Solok berada di urutan kelima setelah Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman. Kota Solok terletak pada jalur strategis lintas Sumatera Barat Bagian Timur yang menghubungkan Provinsi Jambi dan Sumatera Utara dengan Kota Padang.

Posisi Kota Solok yang berada di tengah-tengah perlintasan membuat peran Kota Solok menjadi penting dalam menunjang ekonomi masyarakat. Topografi Kota Solok

sangat bervariasi antara dataran dan bukit dengan ketinggian rata-rata 390 meter di atas permukaan laut, dengan suhu maksimum 35,1 C dan minimum 19,4 C. Kota Solok terdiri dari 2 kecamatan yaitu Lubuk Sikarah dengan luas 35 km² dan Tanjung Harapan dengan luas 22,64 km, 13 Kelurahan, 54 Rukun Warga dan 151 Rukun Tetangga. ASN yang bekerja pada Pemerintah Kota Solok pada tahun 2021 berjumlah 2.069 orang yang terdiri dari 35,77 persen laki-laki dan 64,23 persen perempuan. Berdasarkan hasil pendataan *Long Form* sensus penduduk 2020 (SP2020) penduduk Kota Solok berjumlah 74.469 jiwa pada tahun 2021 dengan jumlah penduduk laki-laki 37.522 jiwa dan perempuan 36.947 jiwa.

C. Analisis Deskriptif

1. Kualitas Pencatatan Akuntansi AkruaI Setiap Jenis Transaksi AkruaI di Kab Padang Pariaman

Nilai kualitas pencatatan akuntansi akruaI pada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (Transaksi konversi asset menjadi pengeluaran, biaya yang belum dibayar, akruaI aktiva yang belum dibayar, transaksi penerimaan tidak tertagih), terlihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Nilai Kualitas AkruaI Padang Pariaman

NO	OPD	Nilai Kualitas Pencatatan AkruaI Padang Pariaman			
		Transaksi Konversi Asset Menjadi Pengeluaran	Biaya Yang Belum Dibayar	AkruaI Aktiva Yang Belum Dibayar	Transaksi Penerimaan Tidak Tertagih
1	OPD A	0,92	0,88	0,60	0,27
2	OPD B	0,83	0,92	0,67	0,27
3	OPD C	0,83	0,94	0,53	0,27
4	OPD D	0,58	0,67	0,35	0,07
5	OPD E	0,69	0,75	0,53	0,27
6	OPD F	0,83	0,88	0,53	0,27
7	OPD G	0,92	0,83	0,67	0,27
8	OPD H	0,83	0,75	0,60	0,47
9	OPD I	0,83	0,94	0,53	0,27
10	OPD J	0,92	0,94	0,53	0,60
11	OPD K	0,83	0,94	0,60	0,27

NO	OPD	Transaksi Konversi Asset Menjadi Pengeluaran	Biaya Yang Belum Dibayar	Akrual Aktiva Yang Belum Dibayar	Transaksi Penerimaan Tidak Tertagih
12	OPD L	0,83	0,88	0,53	0,00
13	OPD M	0,92	0,69	0,53	0,27
14	OPD N	0,83	0,88	0,40	0,20
15	OPD O	0,75	0,63	0,53	0,33
16	OPD P	0,83	0,75	0,53	0,27
17	OPD Q	0,92	0,94	0,60	0,60
18	OPD R	0,75	0,94	0,60	0,53
19	OPD S	0,92	0,88	0,60	0,27
20	OPD T	0,75	0,94	0,60	0,27
21	OPD U	1,00	1,00	0,53	0,87
22	OPD V	0,75	0,75	0,53	0,27
23	OPD W	0,67	0,81	0,53	0,27
24	OPD X	0,83	0,88	0,52	0,27
25	OPD Y	0,67	0,92	0,53	0,79
26	OPD Z	0,83	0,75	0,60	0,27

Tabel di atas menunjukkan nilai pencapaian kualitas akrual masing-masing OPD di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan 4 jenis transaksi akrual. OPDQ dan OPDU memperoleh nilai kualitas pencatatan akuntansi akrual kategori sangat baik dengan nilai tertinggi adalah 1. Pada transaksi “konversi aset menjadi pengeluaran” nilai pencatatan akrual sebesar 1 yaitu pada OPDU dan minimum sebesar 0,58 pada OPDD. Pada transaksi mencatat “biaya yang belum dibayar” nilai pencatatan akrual sebesar 1 yaitu pada OPDU dan minimum sebesar 0,63 pada OPDO, sementara pada transaksi “akrual aktiva yang belum dibayar” nilai pencatatan akrual sebesar 0,67 yaitu pada OPDB dan minimum sebesar 0,35 pada OPDD. Pada transaksi “penerimaan tidak tertagih” nilai pencatatan akrual sebesar 0,87 yaitu pada OPDU dan minimum sebesar 0,00 atau tidak ada pencapaian pada OPDL.

Tabel 4.2 memperlihatkan nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari jawaban responden terhadap kualitas pencatatan kualitas akrual di pemerintah kabupaten Padang Pariaman

Tabel 4.2
Nilai Maksimum, Minimum, Rata-Rata, dan Standar Deviasi Responden
di Kabupaten Padang Pariaman

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
nilai kualitas D1	26	,583	1,000	,81808	,096047
nilai kualitas D2	26	,625	1,000	,84715	,100248
nilai kualitas D3	26	,350	,667	,55115	,067732
nilai kualitas D4	26	,000	,867	,33565	,196119
Valid N (listwise)	26				

Berdasarkan rata-rata pencapaian kualitas pencatatan akrual di Kabupaten Padang Pariaman, diperoleh rata-rata tertinggi sebesar 0,85 atau 85% yaitu pada transaksi “biaya yang belum dibayar”. Sementara rata-rata terendah adalah pada transaksi “Transaksi Penerimaan Tidak Tertagih” sebesar 0,33 atau 33%.

2. Kualitas Pencatatan Akuntansi Akrual Setiap Jenis Transaksi Akrual di Kota Solok

Nilai pencatatan kualitas akuntansi akrual pada pemerintah Kota Solok (Transaksi konversi asset menjadi pengeluaran, biaya yang belum dibayar, akrual aktiva yang belum dibayar, transaksi penerimaan tidak tertagih), terlihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Nilai Kualitas Akrual Kota Solok

NO	OPD	Nilai Kualitas Akrual			
		Transaksi Konversi Asset Menjadi Pengeluaran	Biaya Yang Belum Dibayar	Akrual Aktiva Yang Belum Dibayar	Transaksi Penerimaan Tidak Tertagih
1	OPD A	0,75	1,00	0,65	0,00
2	OPD B	0,58	0,88	0,60	0,27
3	OPD C	0,83	0,88	0,90	0,27
4	OPD D	0,67	1,00	0,80	0,00
5	OPD E	0,67	1,00	1,00	0,00
6	OPD F	0,50	1,00	0,80	0,00
7	OPD G	0,83	0,83	1,00	0,27
8	OPD H	0,42	0,83	0,80	0,00
9	OPD I	0,83	0,92	1,00	1,00
10	OPD J	0,83	1,00	0,87	0,67

NO	OPD	Nilai Kualitas Akruaal			
		Transaksi Konversi Asset Menjadi Pengeluaran	Biaya Yang Belum Dibayar	Akruaal Aktiva Yang Belum Dibayar	Transaksi Penerimaan Tidak Tertagih
11	OPD K	0,42	1,00	1,00	0,00
12	OPD L	0,92	0,92	1,00	0,60
13	OPD M	0,83	0,92	0,90	0,53
14	OPD N	0,50	0,42	0,70	0,13
15	OPD O	0,17	0,92	0,90	0,00
16	OPD P	0,75	0,83	0,90	0,27
17	OPD Q	0,58	1,00	0,90	0,53
18	OPD R	0,75	0,92	0,90	0,27
19	OPD S	0,83	0,92	0,90	0,33
20	OPD T	0,75	0,83	0,90	0,20
21	OPD U	1,00	1,00	0,80	0,78
22	OPD V	0,83	0,83	1,00	0,00
23	OPD W	0,83	0,92	0,90	0,33
24	OPD X	0,83	0,83	0,80	0,27
25	OPD Y	0,44	0,83	0,80	0,69
26	OPD Z	0,31	1,00	0,80	0,00

Berdasarkan tabel di atas diketahui di OPDA, OPDD, OPDE, OPDF, OPDH, OPDK, OPDO, OPDV dan OPDZ pemerintah Kota Solok terdapat nilai kualitas pencatatan akuntansi akrual sebesar 0 yaitu pada transaksi “penerimaan tidak tertagih”. Tabel di atas menunjukkan nilai pencapaian kualitas akrual masing-masing OPD di Kota Solok berdasarkan 4 jenis transaksi akrual. Pada transaksi “konversi asset menjadi pengeluaran” nilai pencatatan akrual sebesar 1 yaitu pada OPDU dan minimum sebesar 0,17 pada OPDO. Pada transaksi mencatat “biaya yang belum dibayar” nilai pencatatan akrual sebesar 1 yaitu pada OPDA, OPDD, OPDE, OPDF, OPDJ, OPDK, OPDQ, OPDU dan OPDZ dan minimum sebesar 0,42 pada OPDN. Sementara pada transaksi “akruaal aktiva yang belum dibayar” nilai pencatatan akrual sebesar 1 yaitu pada OPDE, OPDG, OPDI, OPDK, OPDL dan OPDV dan minimum sebesar 0,60 pada OPDB. Pada transaksi “penerimaan tidak tertagih” nilai pencatatan akrual sebesar 1 yaitu pada OPDI dan

minimum sebesar 0,00 atau tidak ada pencapaian pada OPDA, OPDD, OPDE, OPDF, OPDH, OPDK, OPDO, OPDV, OPDZ.

Tabel 4.4 memperlihatkan nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari jawaban responden terhadap kualitas pencatatan kualitas akrual di pemerintah Kota Solok.

Tabel 4.4
Nilai Maksimun, Minimum, Rata-Rata, dan Standar Deviasi Responden
di Kota Solok

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
nilai kualitas D1	26	,167	1,000	,67946	,206645
nilai kualitas D2	26	,417	1,000	,90065	,119662
nilai kualitas D3	26	,600	1,000	,86604	,108370
nilai kualitas D4	26	,000	1,000	,28481	,286894
Valid N (listwise)	26				

Berdasarkan rata-rata pencapaian kualitas pencatatan akrual di Kota Solok, diperoleh rata-rata tertinggi sebesar 90% yaitu pada transaksi “biaya yang belum dibayar”. Sementara rata-rata terendah adalah pada transaksi “Transaksi Penerimaan Tidak Tertagih” sebesar 28,48%. Hal ini disebabkan karena banyak terdapat pencapaian dengan jawaban “tidak” pada item pertanyaan kuisisioner (karena OPD tidak ada aktivitas transaksi tersebut).

3. Kualitas Pencatatan Akuntansi Akrual di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Solok

Tabel 4.5 memperlihatkan nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari jawaban responden terhadap kualitas pencatatan kualitas akrual di pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Solok.

Tabel 4.5
Nilai Maksimun, Minimum, Rata-Rata, dan Standar Deviasi Jawaban Responden
di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Solok

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total kualitas Kota Solok	26	,414	,832	,62062	,130700
Total kualitas Kab Padang Pariaman	26	,417	,871	,65304	,085617
Valid N (listwise)	26				

Tabel di atas menunjukkan total nilai pencapaian kualitas akrual untuk seluruh jenis transaksi akrual di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Solok. Berdasarkan nilai tertinggi, diperoleh kesimpulan bahwa kualitas pencatatan akuntansi akrual pemerintah Padang Pariaman (87,1%) lebih baik dibandingkan kualitas pencatatan akuntansi akrual pada pemerintah Kota Solok (83,2%) dan nilai terendah kualitas pencatatan akuntansi akrual pemerintah Kota Solok (41,4%) lebih rendah daripada kualitas pencatatan akuntansi akrual pemerintah Padang Pariaman (41,7%). Untuk melihat perbandingan kualitas pencatatan akuntansi akrual pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Solok, dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini :

Tabel 4.6
Nilai Maksimum, Minimum dan nilai kualitas akuntansi akrual
masing-masing OPD di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Solok

NO	OPD	Total Nilai Pencapaian	Total Nilai Maksimum	Total Nilai Kualitas	
				Solok	Padang Pariaman
1	OPD A	8,85	14	0,63	0,68
2	OPD B	7,85	13	0,60	0,67
3	OPD C	8,60	12	0,72	0,67
4	OPD D	6,60	11	0,60	0,42
5	OPD E	7,00	11	0,64	0,58
6	OPD F	6,10	11	0,56	0,65
7	OPD G	7,80	11	0,71	0,67
8	OPD H	5,35	11	0,49	0,67
9	OPD I	10,25	11	0,93	0,67
10	OPD J	11,10	13	0,85	0,76
11	OPD K	6,25	11	0,57	0,68
12	OPD L	10,30	12	0,86	0,59
13	OPD M	8,65	11	0,79	0,61
14	OPD N	4,55	11	0,41	0,60
15	OPD O	5,05	11	0,46	0,57
16	OPD P	7,35	11	0,67	0,61
17	OPD Q	9,15	12	0,76	0,79
18	OPD R	7,60	11	0,69	0,72
19	OPD S	8,05	11	0,73	0,68
20	OPD T	7,15	11	0,65	0,66

NO	OPD	Total Nilai Pencapaian	Total Nilai Maksimum	Total Nilai Kualitas	
				Solok	Padang Pariaman
21	OPD U	10,70	12	0,89	0,87
22	OPD V	7,00	11	0,64	0,59
23	OPD W	8,05	11	0,73	0,59
24	OPD X	7,40	11	0,67	0,64
25	OPD Y	10,15	15	0,68	0,73
26	OPD Z	6,65	13	0,51	0,62

Pada OPDA kualitas pencatatan akuntansi akrual pemerintah Padang Pariaman (68%) lebih baik dibandingkan Kota Solok (63%). Pada OPDB kualitas pencatatan akuntansi akrual pemerintah Padang Pariaman (67%) lebih baik dibandingkan Kota Solok (60%). Pada OPDC kualitas pencatatan akuntansi akrual pemerintah Kota Solok (71%) lebih baik dibandingkan Padang Pariaman (67%). Pada OPDD kualitas pencatatan akuntansi akrual pemerintah Kota Solok (60%) lebih baik dibandingkan Padang Pariaman (42%). Pada OPDE kualitas pencatatan akuntansi akrual pemerintah Kota Solok (64%) lebih baik dibandingkan Padang Pariaman (58%). Pada OPDF kualitas pencatatan akuntansi akrual pemerintah Padang Pariaman (65%) lebih baik dibandingkan Kota Solok (56%).

Pada OPDG kualitas pencatatan akuntansi akrual pemerintah Kota Solok (71%) lebih baik dibandingkan Padang Pariaman (67%). Pada OPDH kualitas pencatatan akuntansi akrual pemerintah Padang Pariaman (67%) lebih baik dibandingkan Kota Solok (49%). Pada OPDI kualitas pencatatan akuntansi akrual pemerintah Kota Solok (93%) lebih baik dibandingkan Padang Pariaman (67%). Pada OPDJ kualitas pencatatan akuntansi akrual pemerintah Kota Solok (85%) lebih baik dibandingkan Padang Pariaman (76%). Pada OPDK kualitas pencatatan akuntansi akrual pemerintah Padang Pariaman (68%) lebih baik dibandingkan Kota Solok (57%).

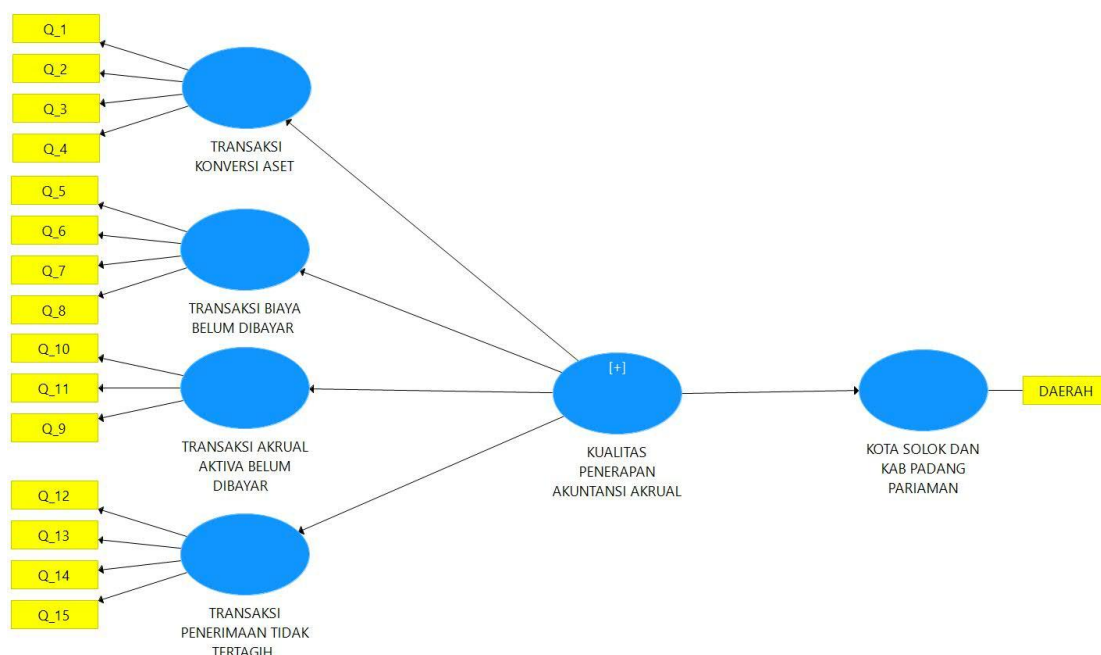
Pada OPDL, OPDM, OPDP, OPDS, OPDU, OPDV, OPDW dan OPDX maka kualitas pencatatan akuntansi akrual pemerintah Kota Solok lebih baik dibandingkan Padang Pariaman. Sementara pada OPDN, OPDO, OPDQ, OPDR, OPDT, OPDY dan OPDZ kualitas pencatatan akuntansi akrual pemerintah Padang Pariaman lebih baik dibandingkan Kota Solok. Hal ini dapat dilihat dari total nilai pencapaian kualitas pada semua jenis transaksi akrual.

D. Analisis SEM

1. Diagram Jalur

Diagram merupakan salah satu teknik untuk menggambarkan sebuah konsep yang dibangun dengan menggunakan beberapa indikator terukur. Diagram jalur dalam penelitian ini dilakukan terhadap 2 variabel laten. Masing-masing variabel laten memiliki indikator.

Diagram jalur dalam penelitian dipaparkan pada gambar berikut:



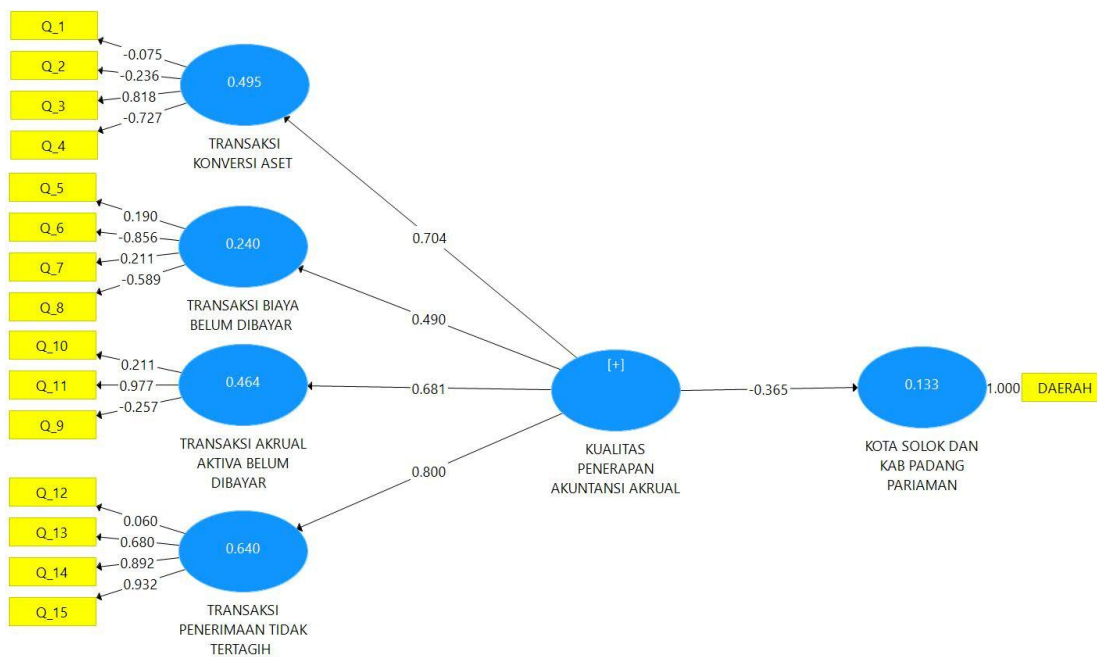
Gambar 1. Diagram Jalur

2. Analisis Outer model (model pengukuran)

Pengujian kelayakan data perlu dilakukan sebelum pengujian hipotesis dengan mengukur validitas dan reliabilitas variabel teramati. Menurut Hulland (2010) model pengukuran yang baik harus memenuhi tiga kriteria yaitu reliabilitas (*reliability*), *convergent validity* dan *discriminant validity*. Berikut hasil uji validitas dan reliabilitas:

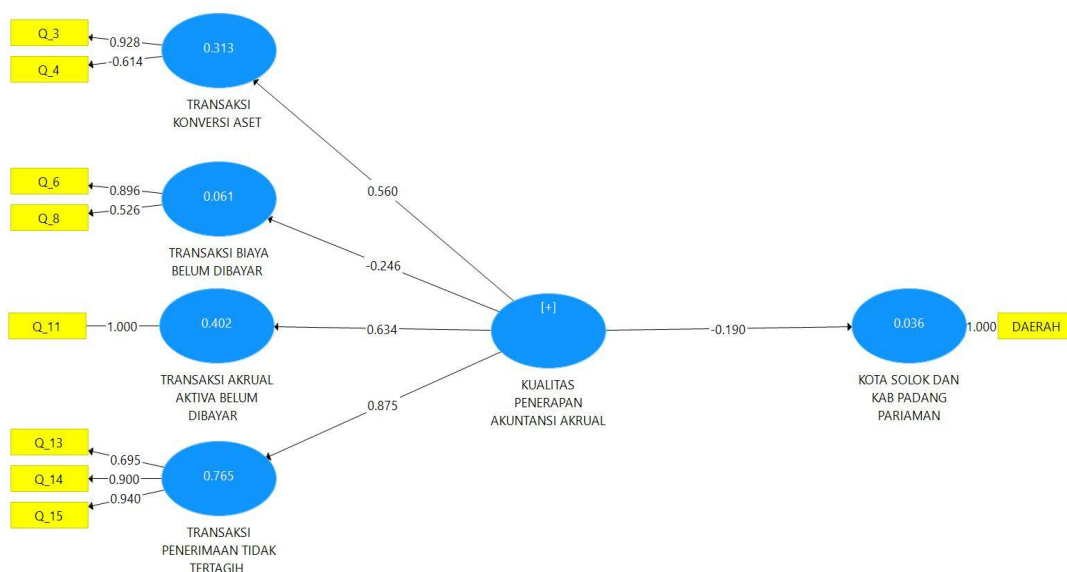
a. Uji Validitas Konvergen

Pembuktian validitas konvergen dicapai melalui pencapaian kriteria dan uji perbandingan model. Pada penelitian ini validitas konvergen dibuktikan melalui pencapaian kriteria dalam pendekatan SEM/PLS, sebuah pengukuran telah memenuhi validitas konvergen apabila telah memenuhi syarat yaitu memiliki loading faktor indikator minimal 0,4 (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2017; Jogiyanto, 2011). Hasil loading faktor disajikan pada gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 2
Outer Model Step 1

Indikator yang mempunyai nilai loading faktor yang besar menunjukkan bahwa indikator tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan variabel laten sehingga mendukung tingginya reliabilitas. Nilai muatan faktor (faktor loading) dipaparkan pada gambar 2 berada pada rentang nilai antara 0,060 sampai 1,000 artinya bahwa terdapat indikator mempunyai faktor loading lebih kecil dari 0,4. Hasil ini menunjukkan bahwa belum semua indikator memiliki validitas konvergen yang baik. Dengan demikian, semua indikator belum dikatakan valid dalam mengukur masing-masing variabel latennya. Indikator dengan nilai loading faktor kecil dari 0,4 didrop dari model dengan hasil sebagai berikut:



Gambar 3
Outer Model Step 2

Nilai muatan faktor (faktor loading) dipaparkan pada gambar 3 berada pada rentang nilai antara 0,526 sampai 1,000 artinya bahwa tidak terdapat indikator mempunyai faktor loading lebih kecil dari 0,4. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa semua indikator memiliki validitas konvergen baik. Dengan demikian, semua indikator dikatakan valid dalam mengukur masing-masing variabel latennya.

b. Uji Validitas Diskriminan

Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan nilai validitas suatu variabel bila dibandingkan dengan variabel lainnya maka dilakukan uji validitas diskriminan. Salah satu cara untuk melakukan pengukuran validitas diskriminan adalah dengan membandingkan nilai akar kuadrat dari *average variance extracted* (AVE) yang diperoleh melalui nilai korelasi antar variabel (Hair *et al.*, 2010). Apabila nilai akar kuadrat *average variance extracted* (AVE) variabel laten lebih besar dari 0,7 dan lebih besar dari nilai korelasi dengan seluruh variabel laten lainnya maka dikatakan memiliki validitas diskriminan yang baik. Nilai pengukuran AVE yang direkomendasikan adalah lebih besar dari 0,50.

Tabel 4.7
Nilai AVE

Variabel Dan Dimensi Penelitian	Average Variance Extracted(Ave)
Kota Solok Dan Kab Padang Pariaman	1,000
Kualitas Penerapan Akuntansi Akrua	0,538
Transaksi Akrua Aktiva Belum Dibayar	1,000
Transaksi Biaya Belum Dibayar	0,536
Transaksi Konversi Aset	0,627
Transaksi Penerimaan Tidak Tertagih	0,726

Sumber : Hasil penelitian, diolah dengan *Smart PLS 3.0*, 2022

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai AVE dari keseluruhan variabel laten berkisar antara 0,536 sampai 1,000 artinya bahwa semua indikator mempunyai faktor loading lebih besar dari 0,5. Dengan demikian, semua indikator dikatakan valid dalam mengukur masing-masing variabel latennya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel laten yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai validitas diskriminan yang baik.

Tabel 4.8
Nilai *fornell larcker criterion*

	Kota Solok Dan Kab Padang Pariaman	Kualitas Penerapan Akuntansi Akrua	Transaksi Akrua Aktiva Belum Dibayar	Transaksi Biaya Belum Dibayar	Transaksi Konversi Aset	Transaksi Penerimaan Tidak Tertagih
Kota Solok Dan Kab Padang Pariaman	1,000					
Kualitas Penerapan Akuntansi Akrua	-0,139	0,733				
Transaksi Akrua Aktiva Belum Dibayar	-0,289	0,487	1,000			
Transaksi Biaya Belum Dibayar	0,329	-0,220	-0,236	0,732		
Transaksi Konversi Aset	-0,360	0,414	0,625	-0,205	0,792	
Transaksi Penerimaan Tidak Tertagih	-0,040	0,951	0,229	-0,173	0,191	0,852

Sumber : Hasil penelitian, diolah dengan *Smart PLS 3.0*, 2022

Tabel 4.8 menunjukkan nilai *fornell larcker* yang merupakan nilai akar kuadrat AVE seluruh variable. Nilai *fornell larcker* berkisar antara 0,732 sampai 1,000 artinya bahwa

nilai akar kuadrat AVE seluruh variabel lebih besar dari 0,7. Dari hasil terlihat bahwa semua variabel laten dalam penelitian ini mempunyai validitas diskriminan yang baik.

c. Reliabilitas Komposit

Reliabilitas yang mengukur variabel laten atau reliabilitas komposit (Hair *et al.*, 2010), dimana reliabilitas ini menggunakan koefisien reliabilitas untuk menjelaskan model pengukuran yang diuji. Hulland (2010) menyatakan bahwa koefisien ini merupakan koefisien konsistensi internal yang mendekati nilai koefisien internal Cronbach. Koefisien reliabilitas ini cocok untuk pengukuran konjenerik yang mengansumsikan bahwa presisi dan skala ukur antar indikator memiliki perbedaan. Kelompok Indikator yang mengukur sebuah variabel memiliki reliabilitas komposit yang baik jika memiliki reliabilitas komposit $\geq 0,7$ meskipun bukan merupakan standar absolut. Hasil reliabilitas komposit dipaparkan pada Tabel 4.9

Tabel 4.9
Nilai Reliabilitas Komposit

Variabel Dan Dimensi Penelitian	Average Variance Extracted (Ave)
Kota Solok Dan Kab Padang Pariaman	1,000
Kualitas Penerapan Akuntansi Akrua	0,864
Transaksi Akrua Aktiva Belum Dibayar	1,000
Transaksi Biaya Belum Dibayar	0,872
Transaksi Konversi Aset	0,810
Transaksi Penerimaan Tidak Tertagih	0,887

Sumber : Hasil penelitian, diolah dengan *Smart PLS 3.0*, 2022

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai reliabilitas komposit seluruh variabel laten berkisar antara 0,810 sampai dengan 1,000 artinya bahwa keseluruhan nilai reliabilitas komposit $\geq 0,7$. Nilai tersebut menunjukkan seluruh variabel laten mempunyai reliabilitas komposit yang baik. Dengan demikian pengujian ouetr model atau model pengukuran telah dilakukan, indikator dan variabel laten dalam penelitian ini memiliki validitas convergent, validitas diskriminan dan reliabilitas yang baik. Sehingga layak dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pengujian hipotesis atau pengujian model struktural.

3. Analisis Inner Model (model structural)

Model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antar peubah laten atau dikenal dengan inner model. Evaluasi inner model dilakukan untuk menilai pengaruh konstruk antar laten dan pengujian hipotesis. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-Square untuk konstruk dependen, nilai koefisien path atau t-value tiap path untuk tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Semakin tinggi nilai R-Square berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan (Jogiyanto 2011). Model struktural ini dievaluasi dengan R-Square untuk peubah endogen dan membandingkan t-hitung dengan t-tabel (t-tabel pada selang kepercayaan 95% adalah 1.645).

a. Uji Kesesuaian Model (*Goodness of fit*)

Uji kesesuaian model berdasarkan kriteria yang ditetapkan disebut *Goodness of Fit*. *Goodness of Fit* diukur memakai *R-square* variabel laten dependen dengan interpretasi yang sama dengan regresi. Nilai R^2 dipaparkan pada Tabel 4.10

Tabel 4.10
Hasil nilai *R-square*

	R Square	R Square Adjusted
Kota Solok Dan Kab Padang Pariaman	0,019	0,000
Transaksi Akrua Aktiva Belum Dibayar	0,237	0,222
Transaksi Biaya Belum Dibayar	0,048	0,029
Transaksi Konversi Aset	0,171	0,155
Transaksi Penerimaan Tidak Tertagih	0,904	0,902

Sumber : Hasil penelitian, diolah dengan *Smart PLS 3.0*, 2022

Nilai *R-square* menunjukkan hasil atas representasi variabel. Berdasarkan nilai R^2 yang tertera pada Tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa

1. Dimensi transaksi konversi aset dapat dijelaskan oleh indikator 3 dan 4 sebesar 17,1 %, sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti atau dimasukkan dalam model penelitian ini.
2. Dimensi transaksi biaya belum dibayar dapat dijelaskan oleh indikator 6 dan 8 sebesar 4,8 %, sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti atau dimasukkan dalam model penelitian ini.

3. Dimensi transaksi akrual aktiva belum dibayar dapat dijelaskan oleh indikator 11 sebesar 23,7 %, sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti atau dimasukkan dalam model penelitian ini.
4. Diimensi transaksi penerimaan tidak tertagih dapat dijelaskan oleh indikator 13,14 dan 15 sebesar 90,4 %, sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti atau dimasukkan dalam model penelitian ini.
5. Variabel penerapan akuntansi akrual di kota Solok dan Padang Pariaman dapat dijelaskan oleh 5 dimensi sebesar 1,9% sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti atau dimasukkan dalam model penelitian ini

b. Uji hipotesis model koefisien jalur

Uji hipotesis ini merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel, dengan nilai p (probabilitas) $< 0,05$. Hasil uji hipotesis dipaparkan pada Tabel 4.11

Tabel 4.11
Pengujian Model Struktural

Hipotesis	Sample Mean (M)	T Statistics (O/Stdev)	P Values
Kualitas Penerapan Akuntansi Akrual -> Kab Padang Pariaman dan Kota Solok	0,067	8,601	0,013

Sumber : Hasil Penelitian, Diolah Dengan *Smart Pls 3.0*, 2022

c. Pengujian Hipotesis

Berdasarkan tabel 4.11 dan gambar 4 diperoleh nilai sample mean sebesar 0,067, nilai signifikansi sebesar $0,013 < 0,05$ dan nilai T statistik sebesar $8,601 > T$ tabel 1,645 sehingga tolak H_0 dan terima H_1 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kualitas pencatatan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Kota Solok. Nilai sample mean sebesar 0,067 bermakna kualitas pencatatan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ($D=2$) 0,067 lebih tinggi atau lebih baik daripada kualitas pencatatan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah Kota Solok.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang menyatakan bahwa : “ Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman secara intens memberikan

pembinaan dan bimbingan teknis tentang pencatatan akuntansi akrual kepada aparatur penyusun laporan keuangan serta pendampingan rutin dalam penyusunan laporan keuangan, selain itu BPKD juga melakukan rekonsiliasi data keuangan secara rutin setiap bulan, yang dihubungkan dengan pencairan dana OPD, sinkronisasi data pertriwulan dan akhir tahun sehingga mempermudah dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Berbagai upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas pencatatan akuntansi akrual dalam pemerintahan”.

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk pencatatan akuntansi akrual secara menyeluruh dengan memberikan bimbingan dan pembinaan kepada aparatur penyusun laporan keuangan sehingga pencatatan akuntansi akrual di pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat berjalan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Komitmen penerapan akuntansi akrual juga terlihat pada Pemerintah Kota Solok, dimana pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pencatatan akuntansi akrual di pemerintahannya, hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang akuntansi pemerintah Kota Solok yang menyatakan bahwa : “Pemerintah Kota Solok secara intens melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pembuatan laporan keuangan, melakukan rekonsiliasi data keuangan dan data asset pertriwulan, semesteran dan akhir tahun, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pencatatan akuntansi akrual pada pemerintah Kota Solok”. Komitmen pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Solok dalam pencatatan akuntansi akrual merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah dalam mensukseskan pencatatan akuntansi akrual dalam pemerintahan.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Kualitas pencatatan akuntansi akrual pada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan pemerintah Kota Solok menunjukkan bahwa nilai kualitas pencatatan akrual di Kota Solok tertinggi pada “transaksi biaya yang belum dibayar” dan terendah pada transaksi “Penerimaan tidak tertagih”, sedangkan pencapaian kualitas penerapan akrual di Kabupaten Padang Pariaman tertinggi pada transaksi “biaya yang belum dibayar” dan terendah pada transaksi “Penerimaan tidak tertagih”.
2. Terdapat perbedaan kualitas pencatatan akuntansi berbasis akrual antara pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Pemerintah Kota Solok yaitu kualitas pencatatan akuntansi akrual pemerintah Padang Pariaman 87,1 % lebih baik dari Kota Solok 83,2 % dan berdasarkan hasil uji hipotesis disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kualitas pencatatan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah Kota Solok dengan Kabupaten Padang Pariaman.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai kualitas pencatatan akuntansi akrual pada pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Solok, disarankan pada penelitian selanjutnya dapat lebih mengeksplere dan meneliti lebih dalam lagi terkait kualitas pencatatan akuntansi akrual dalam pemerintahan tidak hanya dengan menggunakan kuesioner tetapi bisa dilengkapi dengan wawancara langsung agar mendapatkan informasi lebih luas.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

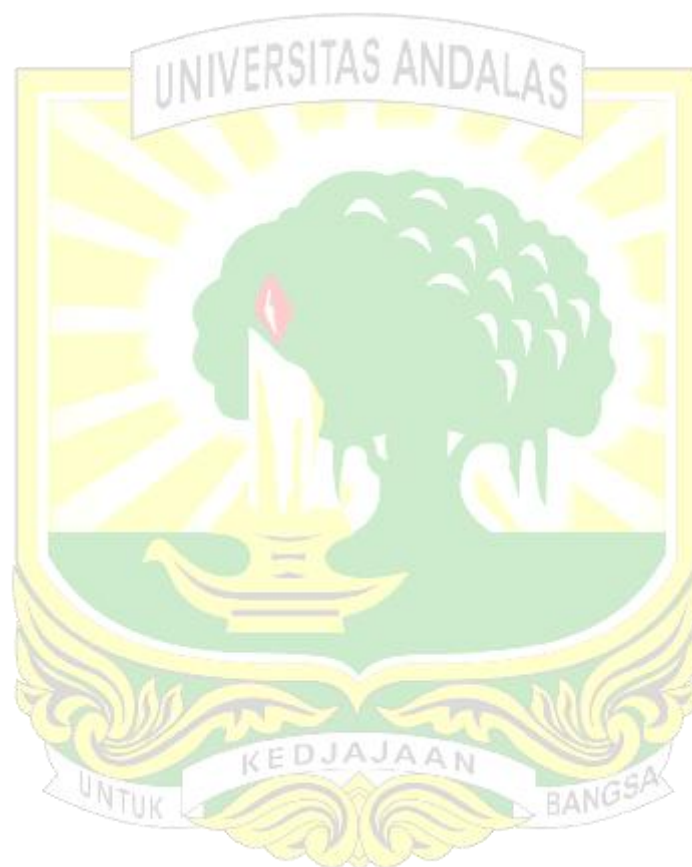
- Athukorala, S. L., & Reid, B. 2003. "Accrual Budgeting and Accounting in Government and its Relevance for Developing Member Countries. Manila: Asian Development Bank.
- (OECD), O. f. E. C.-o. a. D. 2002. *Accrual Accounting and Budgeting: Public Management Committee*.
- Bastian, I. 2010. "Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga". *Jakarta: Erlangga*.
- BPK. 2015. "Pendapat BPK: Kesiapan Pemerintah dalam Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua Tahun 2015".
- Budiono, A. 2016. "Penerapan Standar Akuntansi Persediaan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2015", Tesis, Jakarta, STIA LAN.
- Carlin, T. M. 2005. "Debating the impact of accrual accounting and reporting in the public sector". *Financial Accountability & Management*, Vol. 21, No. 3, hlm: 309-336.
- Chan, J. L. 2003. "Government accounting: an assessment of theory, purposes and standards". *Public Money & Management*, Vol. 23, No. 1, hlm: 13-20.
- Davis, F. D. 1989. "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology". *MIS quarterly*, Vol., No., hlm: 319-340.
- . 1993. "User acceptance of information technology: system characteristics, user perceptions and behavioral impacts". *International journal of man-machine studies*, Vol. 38, No. 3, hlm: 475-487.
- Djamhuri, A. 2009. "A case study of governmental accounting and budgeting Reform at local authority in indonesia: an institutionalist perspective". *Universiti Sains Malaysia*.
- Fishbein, M., I. Ajzen, dan A. Belief. 1975. *Intention and Behavior: An introduction to theory and research*: Addison-Wesley, Reading, MA.
- García-Teruel, P. J., P. Martínez-Solano, dan J. P. Sánchez-Ballesta. 2009. "Accruals quality and corporate cash holdings". *Accounting & Finance*, Vol. 49, No. 1, hlm: 95-115.
- Hariyanto, A. 2014. "Penggunaan Basis Akrua Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia". *Dharma Ekonomi*, Vol. 19, No. 36.
- Harun, H., dan P. Robinson. 2010. "The adoption of accrual accounting in the Indonesian public sector". Pada *Research in Accounting in Emerging Economies*: Emerald Group Publishing Limited.
- Harun, H., K. Van-Peursem, dan I. R. Eggleton. 2015. "Indonesian public sector accounting reforms: dialogic aspirations a step too far?". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.

- Herman, H. 2016. "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Dengan Bantuan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan", Universitas Andalas.
- Herwiyanti, E., S. Sukirman, dan F. S. Aziz. 2017. "Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 19, No. 1, hlm: 13-23.
- Hoesada, J. 2010. "Accrual Budgeting and Accrual Accounting pada Pemerintahan NKRI". *Jurnal Akuntansi/Tahun XIV*, Vol., No. 01, hlm: 113-124.
- Ismiyati. 2016. "Evaluasi Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI (studi kasus pada lima pemerintah daerah)", Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Jati, B. P. 2019. "Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akruaI terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah". *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 22, No. 1, hlm: 1-14.
- Kara, E., dan Y. Kilic. 2011. "Accounting recording system on accrual basis at local authorities in Turkey: An application in Gaziantep local municipality". *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 2, No. 15, hlm: 244-250.
- Khasanah, H. D., dan O. L. Pramudyastuti. 2020. "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI di RSJ Prof. dr. Soerojo Magelang". *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis*, Vol. 5, No. 2, hlm: 145-153.
- Kumaradewi, K. A. 2018. "Kajian Atas Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Pusat Indonesia Tahun 2015-2017". *Accounting and Business Information Systems Journal*, Vol. 7, No. 4.
- Lye, J., H. Perera, dan A. Rahman. 2005. "The evolution of accruals-based Crown (government) financial statements in New Zealand". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Pemerbit dan Percetakan Sekolah tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mu'am, A. 2015. "Basis AkruaI dalam Akuntansi Pemerintah di Indonesia". *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, Vol. 2, No. 1, hlm: 38-46.
- Munawir. 2002. *Financial Accounting and Management*. Yogyakarta: BPFE.
- Nugraha, W. 2009. "Pengaruh Pemahaman atas Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Keefektifan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi sebagai Variabel Mediasi". *Skripsi, Bandung, Universitas Padjajaran*.
- Nyamita, M. O., N. Dorasamy, H. L. Garbharran, M. Nyamita, N. Dorasamy, dan H. Garbharran. 2015. "A review of public sector financial management reforms: an international perspective". *Public and Municipal Finance*, Vol. 4, No. 2, hlm: 25-37.

- Octesa, C. B. 2016. "Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman Kerja Terhadap Tingkat Pemahaman SAP Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Kota Solok", Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas.
- Osborne, D., dan T. Gaebler. 1992. "Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is". *Transforming the Public Sector*.
- Prabowo, T. J. W., P. Leung, dan J. Guthrie. 2017. "Reforms in public sector accounting and budgeting in Indonesia (2003-2015): Confusions in implementation". *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*.
- Prasetya, M. N., dan I. Indrayeni. 2021. "Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal Pada Dinas Pariwisata Kota Solok". *Borobudur Accounting Review*, Vol., No., hlm: 89-101.
- Purwanto, W. 2015. "Kajian Penerapan Akuntansi Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta", Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gajah mada, Yogyakarta.
- Retnowati, E., dan A. Riduwan. 2020. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Pemahaman Akuntansi Berbasis Akruwal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Vol. 9, No. 5.
- Ritonga, I. Year. "Lesson learned from early implementation stage of accrual accounting in Indonesia local government–A case study in Province XYZ". Artikel dipresentasikan pada *International Public Sector Conference (IPSC) 2015*.
- Ritonga, I. T. 2018. "Analysing the quality of accrual accounting implementation in indonesia local governments". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 22, No. 2, hlm: 162-172.
- Ryan, C. 1998. "The introduction of accrual reporting policy in the Australian public sector: an agenda setting explanation". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
- Sari, D. P., dan H. S. Putra. 2012. "Menelisik Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal". *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 11, No. 2.
- Satrio, M. D., I. Yuhertiana, dan A. Hamzah. 2016. "Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal di Kabupaten Jombang". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 18, No. 1, hlm: 59-70.
- Sousa, R. G., Vasconcelos, A. F., Caneca., R. L., Niyama, J. K. 2012. "Accrual Basis Accounting in the Brazilian Public Sector: Empirical Research on the Usefulness of Accounting Information. Paper presented at the 12th USP Congress of Controllershship and Accounting, São Paulo, July 2012.
- Sekaran, U., dan R. Bougie. 2016. *Research methods for business: A skill building approach*: John Wiley & Sons.
- Simanjuntak, B. 2010. Penerapan Akuntansi Berbasis Akruwal di Sektor Pemerintahan di Indonesia [Implementing Accrual Accounting System in Indonesia Governments]: Online].[Online] Available at www.iaiglobal.or.id/tentang_iai_download.php.

- Sinaga, J. 2005. "Selamat datang standar akuntansi pemerintahan". <http://ksap.org/Riset&Artikel/Art8.pdf>.
- Sudaryati, E., dan T. D. i. Permana. 2020. "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur". *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 5, No. 1, hlm: 1-13.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suwanda, D. 2015. "Factors affecting quality of local government financial statements to get unqualified opinion (WTP) of audit board of the Republic of Indonesia (BPK)". *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol. 6, No. 4, hlm: 139-157.
- Tresnawati, E. F., dan A. R. Setiawan. 2014. "Ada Apa dengan SAP (AADS) AkruaL?". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 4, No. 2, hlm: 198-215.
- Trihani, I. 2018. "Analisis Manfaat Basis AkruaL dan Basis Kas Menuju AkruaL dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD di Kota Solok)". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, No. 1.
- Venkatesh, V., M. G. Morris, G. B. Davis, dan F. D. Davis. 2003. "User acceptance of information technology: Toward a unified view". *MIS quarterly*, Vol., No., hlm: 425-478.
- Wahyudi, I. 2019. "Analisis kualitas implementasi akuntansi berbasis akruaL". *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, Vol. 4, No. 1, hlm: 13-22.
- Wahyuni, N. E. 2016. "Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL dalam Perspektif Teori Institusional: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Malang". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 4, No. 1.
- Wawointana, W. J., D. P. Saerang, dan D. Afandi. 2021. "Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Bkad) Kota Manado". *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 9, No. 3, hlm: 822-831.
- Wescott, C. G. 2008. "World Bank support for public financial management: Conceptual roots and evidence of impact". *Available at SSRN 1169783*.
- Weygant, P. D. K., Donald E Kieso. 2013. *Financial Accounting: IFRS edition*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Widjajarso, B. 2009. *Penerapan Basis AkruaL pada Akuntansi Pemerintah Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
- Wynne, A. 2008. "Accrual accounting for the public sector—a fad that has had its day". *International Journal on Governmental Financial Management*, Vol. 8, No. 2, hlm: 117-132.

- Yuliati, R., Y. Yuliansyah, dan Y. E. Adelina. 2019. "The implementation of accrual basis accounting by Indonesia's local governments". *International Review of Public Administration*, Vol. 24, No. 2, hlm: 67-80.
- Yusuf, A. A dan Nurhayati, N. 2017. "Analisis Penggunaan Metode Pencatatan *Cash Basis* dan *Accrual Basis* pada Transaksi-Transaksi di Bank Syariah. *Al Amwal*, Vol 9, No 1.
- Zelmiyanti, R. 2015. "Perkembangan akuntansi berbasis akrual pada sektor pemerintah di indonesia". *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, Vol. 6, No. 1, hlm: 68-72.



Lampiran**KUESIONER****KUALITAS PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL****DI PEMERINTAH KOTA SOLOK DAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Nama Responden :

Pekerjaan :

Nama Pemerintah Daerah :

Petunjuk

1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jujur berdasarkan pengetahuan terbaik Anda terhadap penerapan akuntansi akrual di pemerintah daerah Anda.
2. Jawablah pertanyaan dengan membubuhkan tanda tebal atau melingkari pilihan jawaban yang telah disediakan.
3. Jika anda ragu dalam menjawab pertanyaan, anda dapat menghubungi peneliti melalui WA/SMS di +62 85272817006 atau email di nurrahmanely1986@gmail.com

Pertanyaan

No	Uraian	Ya	Tidak
A.	TRANSAKSI KONVERSI ASET MENJADI PENGELUARAN		
1.	Apakah ada transaksi pengeluaran persediaan (konsumsi persediaan) di pemerintah daerah Anda? Jika ya, kapan beban persediaan diakui (dicatat)? A. Akhir setiap bulan B. Akhir setiap triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember) C. Akhir setiap semester (30 Juni, 31 Desember) D. Akhir tahun (31 Desember)		
2.	Apakah ada biaya penyusutan atas transaksi aset tetap (konsumsi aset tetap) di pemerintah daerah Anda? Jika ya, kapan beban penyusutan aset tetap diakui (dicatat)? A. Akhir setiap bulan B. Akhir setiap triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember) C. Akhir setiap semester (30 Juni, 31 Desember)		

	D. Akhir Tahun (31 Desember)		
3.	<p>Apakah ada transaksi biaya amortisasi (pemakaian aset tidak berwujud) di pemerintah daerah Anda?</p> <p>Jika ya, kapan beban amortisasi aset tidak berwujud diakui (dicatat)?</p> <p>A. Setiap akhir bulan</p> <p>B. Setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember)</p> <p>C. Setiap akhir semester (30 Juni, 31 Desember)</p> <p>D. Akhir Tahun (31 Desember)</p>		
4.	<p>Apakah ada transaksi biaya dibayar dimuka (seperti biaya asuransi dibayar dimuka, biaya prabayar bahan bakar, biaya prabayar listrik) di pemerintah daerah Anda?</p> <p>Jika ya, kapan biaya akibat konversi Biaya Dibayar Dimuka diakui? (tercatat)?</p> <p>A. Setiap akhir bulan</p> <p>B. Setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember)</p> <p>C. Setiap akhir semester (30 Juni, 31 Desember)</p> <p>D. Akhir Tahun (31 Desember)</p>		
B.	TRANSAKSI BIAYA YANG BELUM DIBAYAR		
5a.	<p>Apakah ada transaksi pengeluaran Gaji dan Tunjangan yang belum dibayar (misalnya ada pegawai yang sudah mendapat SK kenaikan pangkat atau jabatan, tetapi masih belum dibayar) di pemerintah daerah Anda?</p> <p>Jika Ya, kapan beban gaji dan tunjangan diakui (dicatat)?</p> <p>A. Setiap akhir bulan</p> <p>B. Setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember)</p> <p>C. Setiap akhir semester (30 Juni, 31 Desember)</p> <p>D. Akhir Tahun (31 Desember)</p>		
5b.	Jika jawaban 5a adalah Ya, apakah pengakuan beban gaji dan tunjangan juga diikuti dengan pengakuan utang pengeluaran		

	<p>gaji dan tunjangan?</p> <p>Jika Ya, kapan pengeluaran gaji dan tunjangan diakui (dicatat)?</p> <p>A. Setiap akhir bulan</p> <p>B. Setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember)</p> <p>C. Setiap akhir semester (30 Juni, 31 Desember)</p> <p>D. Akhir Tahun (31 Desember)</p>		
6a.	<p>Apakah ada transaksi biaya kerja lembur yang tidak dibayar (misalnya, ada pegawai yang sudah bekerja lembur, tetapi masih belum dibayar) di pemerintah daerah Anda?</p> <p>Jika Ya, kapan beban biaya kerja lembur diakui (dicatat)?</p> <p>A. Setiap akhir bulan</p> <p>B. Setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember)</p> <p>C. Setiap akhir semester (30 Juni, 31 Desember)</p> <p>D. Akhir Tahun (31 Desember)</p>		
6b.	<p>Jika jawaban 6a adalah Ya, apakah pengakuan biaya kerja lembur juga diikuti dengan pengakuan hutang biaya kerja lembur?</p> <p>Jika Ya, kapan utang biaya kerja lembur diakui (dicatat)?</p> <p>A. Setiap akhir bulan</p> <p>B. Setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember)</p> <p>C. Setiap akhir semester (30 Juni, 31 Desember)</p> <p>D. Akhir Tahun (31 Desember)</p>		
7a.	<p>Apakah ada transaksi biaya utilitas yang belum dibayar (seperti listrik/air/telepon/internet) yang telah dikonsumsi, tetapi masih belum dibayar dipemerintah daerah Anda?</p> <p>Jika Ya, kapan biaya utilitas (listrik / air / telepon / internet) diakui (dicatat)?</p> <p>A. Setiap akhir bulan</p> <p>B. Setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember)</p> <p>C. Setiap akhir semester (30 Juni, 31 Desember)</p>		

	D. Akhir Tahun (31 Desember)		
7b.	<p>Jika jawaban 7a adalah Ya, apakah pengakuan pengeluaran utilitas (listrik/air/telepon/ internet) juga diikuti dengan pengakuan hutang pengeluaran utilitas (listrik/air/telepon/ internet)?</p> <p>Jika ya, kapan Utang Utilitas (listrik/air/telepon/internet) diakui (tercatat)?</p> <p>A. Setiap akhir bulan</p> <p>B. Setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember)</p> <p>C. Setiap akhir semester (30 Juni, 31 Desember)</p> <p>D. Akhir Tahun (31 Desember)</p>		
8a.	<p>Apakah ada transaksi biaya jasa kebersihan / keamanan / katering yang telah dikonsumsi, tetapi masih belum dibayarkan di pemerintah daerah Anda?</p> <p>Jika ya, kapan biaya jasa kebersihan/keamanan/katering diakui (dicatat)?</p> <p>A. Setiap akhir bulan</p> <p>B. Setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember)</p> <p>C. Setiap akhir semester (30 Juni, 31 Desember)</p> <p>D. Akhir Tahun (31 Desember)</p>		
8b.	<p>Jika jawaban 8a adalah Ya, apakah pengakuan biaya jasa kebersihan/keamanan/katering juga diikuti dengan pengakuan pengeluaran jasa kebersihan/keamanan/katering terutang?</p> <p>Jika Ya, kapan hutang jasa kebersihan / keamanan / katering diakui (dicatat)?</p> <p>A. Setiap akhir bulan</p> <p>B. Setiap akhir triwulan (31 Maret; 30 Juni, 30 September, 31 Desember)</p> <p>C. Setiap akhir semester (30 Juni, 31 Desember)</p> <p>D. Akhir Tahun (31 Desember)</p>		

C.	TRANSAKSI AKRUAL AKTIVA YANG BELUM DIBAYAR		
9.	<p>Apakah ada transaksi akuisisi persediaan yang belum dibayar di pemerintah daerah Anda?</p> <p>Jika ya, kapan perolehan suatu persediaan diakui (dicatat)?</p> <p>A. Setiap kali terjadi</p> <p>B. Setiap akhir bulan</p> <p>C. Setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember)</p> <p>D. Setiap akhir semester (30 Juni, 31 Desember)</p> <p>E. Akhir Tahun (31 Desember)</p>		
10.	<p>Apakah ada transaksi akuisisi aset tetap yang belum dibayar di pemerintah daerah Anda?</p> <p>Jika ya, kapan perolehan aset tetap diakui (dicatat)?</p> <p>A. Setiap kali terjadi</p> <p>B. Setiap akhir bulan</p> <p>C. Setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember)</p> <p>D. Setiap akhir semester (30 Juni, 31 Desember)</p> <p>E. Akhir Tahun (31 Desember)</p>		
11.	<p>Apakah ada transaksi akuisisi aset tidak berwujud yang belum dibayar di pemerintah daerah Anda?</p> <p>Jika ya, kapan perolehan aset tidak berwujud diakui (dicatat)?</p> <p>A. Setiap kali terjadi</p> <p>B. Setiap akhir bulan</p> <p>C. Setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember)</p> <p>D. Setiap akhir semester (30 Juni, 31 Desember)</p> <p>E. Akhir Tahun (31 Desember)</p>		
D.	TRANSAKSI PENERIMAAN TIDAK TERTAGIH		
12.	<p>Apakah ada transaksi penerimaan pajak yang tidak tertagih (yang telah menjadi hak pemerintah daerah) di pemerintah daerah Anda?</p>		

	<p>Jika ya, kapan penerimaan pajak yang belum tertagih diakui (dicatat)?</p> <p>A. Setiap kali terjadi</p> <p>B. Setiap akhir bulan</p> <p>C. Setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember)</p> <p>D. Setiap akhir semester (30 Juni, 31 Desember)</p> <p>E. Akhir Tahun (31 Desember)</p>		
13.	<p>Apakah ada transaksi pendapatan yang belum tertagih (yang telah berhak atas pemerintah daerah) di pemerintah daerah Anda?</p> <p>Jika ya, kapan pendapatan beban tak tertagih diakui (dicatat)?</p> <p>A. Setiap kali terjadi</p> <p>B. Setiap akhir bulan</p> <p>C. Setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember)</p> <p>D. Akhir setiap semester (30 Juni, 31 Desember)</p> <p>E. Akhir Tahun (31 Desember)</p>		
14.	<p>Apakah ada transaksi pendapatan dividen yang tidak tertagih atas investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah (dengan asumsi metode biaya) di pemerintah daerah Anda?</p> <p>Jika ya, kapan pendapatan dividen yang tidak tertagih diakui (dicatat)?</p> <p>A. Setiap kali terjadi</p> <p>B. Setiap akhir bulan</p> <p>C. Setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember)</p> <p>D. Setiap akhir semester (30 Juni, 31 Desember)</p> <p>E. Akhir Tahun (31 Desember)</p>		
15.	<p>Apakah ada transaksi pendapatan bunga / pendapatan denda / pendapatan klaim yang tidak tertagih, di pemerintah daerah Anda?</p> <p>Jika ya, kapan pendapatan bunga yang tidak tertagih/ pendapatan denda/pendapatan klaim diakui (dicatat)?</p>		

	A. Akhir setiap bulan B. Akhir setiap triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember) C. Akhir setiap semester (30 Juni,31 Desember) D. Akhir Tahun (31 Desember)		
--	--	--	--

(Sumber : Ritonga (2018))

Terima kasih atas partisipasi Anda dalam penelitian ini

